



# Implementasi Kebijakan & Pengelolaan Dana Desa

*Terhadap*

## Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat



Sri Endang Rahayu, SE., M.Si.



# **Implementasi Kebijakan & Pengelolaan Dana Desa**

*Terhadap*

## **Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa**

**Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.*

**Implementasi Kebijakan  
& Pengelolaan Dana Desa**  
*Terhadap*  
**Capaian Pembangunan Ekonomi  
Masyarakat Desa**  
Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Sri Endang Rahayu, SE., M.Si.



Judul

**MONOGRAFI**

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA  
DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA**

Penulis

**Sri Endang Rahayu., S.E., M.Si.**

Editor

**Nel Arianty., SE., M.M.**

Layouter

**Hikmawan Syahputra., M.A**

Desain Sampul

**Fimanda Arlita, S.Pd.**

Cetakan Pertama; April 2023

**(xii + 222 hlm); 15 x 23 cm**

**ISBN : 978-623-408-331-6**

**E-ISBN : 978-623-408-332-3 (PDF)**

Penerbit



**Redaksi**

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
Aisyiyah)

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
PRAKATA.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	45
C. Tujuan Pembahasan.....	45
BAB 2 PEMBANGUNAN EKONOMI.....	47
A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik.....	49
1. Teori Adam Smith	49
2. Teori Schumpeter	51
3. Teori David Ricardo	52
B. Teori Pembangunan Ekonomi Artur Lewis.....	53
1. Perekonomian Tradisional	54
2. Perekonomian Industri	54
C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery	
.....	56
D. Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Keynesian	
.....	57
E. Teori Pembangunan Ekonomi Harrod-Domar...	58
F. Konsep Millenium Development Goals (MDG's)	
to SDG's.....	62
BAB 3 TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI.....	65
A. Teori Pertumbuhan ekonomi Klasik.....	66
1. Adam Smith	66
2. David Ricardo	68
3. Thomas Robert Malthus	69
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max.....	71
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes.....	73
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik.....	75
1. W.W. Rostow	75
2. Harrod Domar	77

BAB 4	PENDAPATAN NASIONAL, KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGELUARAN PEMERINTAH.....	79
	A. Pendapatan Nasioanal .....	79
	B. Kebijakan Fiskal .....	81
	1. Pajak .....	86
	2. Pengeluaran Belanja .....	86
	3. Obligasi Publik .....	86
	4. Alokasi Anggaran .....	86
	C. Pengeluaran Pemerintah .....	89
	1. Teori Makro .....	89
	2. Teori Mikro .....	95
BAB 5	KEBIJAKAN DANA DESA DAN INDIKATOR KEMAJUAN DESA.....	99
	A. Kebijakan Dana Desa.....	99
	1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	100
	2. Penggunaan Dana Desa .....	102
	B. Indikator Kemajuan Desa .....	105
	1. Indeks Pembangunan Desa (IPD) .....	105
	2. Indeks Desa Membangun (IDM) .....	108
BAB 6	PROSEDUR DAN KERANGKA ANALISIS.....	111
	A. Kerangka Analisis .....	111
	B. Kerangka Konseptual Model Estimasi.....	112
	C. Pendekatan Kajian.....	112
	D. Definisi Operasional .....	113
	E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	114
	F. Populasi dan Sampel .....	115
	G. Teknik Analisis .....	118
BAB 7	KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL KABUPATEN LANGKAT ....	125
	A. Kondisi Geografis.....	125
	B. Kondisi Demografis.....	128
	C. Kondisi Pemerintahan .....	131
	D. Kondisi Ekonomi.....	133
	E. Kondisi Sosial .....	143

BAB 8 IMPLEMENTASI TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA .....	151
A. Analisis Perkembangan Dana Desa .....	151
B. Analisis Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat .....	163
C. Analisis Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Desa Membangun untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat .....	178
D. Analisis Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Langkat Pasca Kebijakan Dana Desa.....	185
E. Analisis dan Evaluasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Kelantan dan Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupten Langkat.	197
BAB 9 PENUTUP .....	205
GLOSARIUM .....	209
DAFTAR PUSTAKA .....	211
TENTANG PENULIS .....	215
TENTANG EDITOR.....	217
INDEKS .....	219



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa memberikan nikmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan nabi Muhammad saw yang telah berjuang dengan hati dan segenap jiwa, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman hingga detik ini.

Buku Monografi Implementasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa mengambil studi kajian di wilayah pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Pada intinya buku ini mengulas lima bagian utama, di antaranya; menganalisis perkembangan Dana Desa, menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebelum kebijakan Dana Desa dan selama ada Dana Desa, menganalisis capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) pada masa pemerintahan Jokowi, mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan menganalisis implementasi tata kelola penggunaan Dana Desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

Semoga buku ini dapat diikmti semua kalangan dan bermanfaat bagi pengembangan kajian penelitian dan keilmuan tentang pembangunan desa. Selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal jariyah bagi pribadi penulis. *Aamin.*

Medan, April 2023

Editor



## PRAKATA

Puji dan syukur, alhamdulillah, tidak henti-hentinya penulis ucapkan dan agungkan kepada Allah swt, karena hanya dengan ridho dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku Monografi Implementasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan nabi Muhammad saw, atas berkat pengorbanan dan keteladanan beliau yang menjadikan kita makhluk beradab yang berjalan di atas muka bumi ini.

Pertama, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak terlibat, baik secara langsung maupun tidak, terhadap penyelesaiannya buku ini, bagi pemerintahan Kabupaten angkat dan masyarakat di Desa Brandan Barat. Tentu saja, bagi orang tua, keluarga, suami dan anak-anak tercinta yang selama ini selalu mendukung penulis untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Pada pembahasan buku ini, penulis meneliti salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Langkat yaitu kecamatan Brandan Barat. Terdiri dari 5 desa yaitu: Kelantan, Perlis, Sei Tualang, Lubuk Kasih dan Lubuk Kertang. Kecamatan Brandan Barat memiliki luas wilayah 89,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 23,294 jiwa/km<sup>2</sup> dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 105,49, kecamatan Brandan Barat merupakan daerah dengan rasio jenis kelamin tertinggi yang memiliki makna bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Pada pengelolaan jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten

Langkat tahun 2021 sebesar Rp 213.259.749.000. Jumlah tersebut dibagi rata dengan jumlah desa yang ada desa yang ada di kabupaten Langkat sebanyak 240 desa. Salah satu Kecamatan yang menerima dana desa adalah kecamatan Brandan Barat.

Penulis ucapkan maaf atas segala khilaf, atas segala tindakan yang mungkin di luar batas kesopanan di dalam proses penelitian untuk menyelesaikan buku ini. Tentu penulis bukanlah manusia sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan bagi penyempurnaan buku ini ke depannya.

Akhir kata, penulis ucapkan selamat membaca dan menikmati setiap sajian dalam buku ini, semoga dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi pengembangan penelitian dan keilmuan ke depannya. *Aamin.*

Medan, April 2023  
Penulis

## BAB 1

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi di dunia internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang ekonominya terbesar di Asia Tenggara dan memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang bagus dan perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, yang memberikan multiplier efek dalam perekonomian.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Pemerataan pembangunan yang dicapai adalah adanya perubahan yang positif yang terjadi di semua bidang yaitu baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya yang tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Todaro (2011) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap

masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi ini perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sadono, 2006).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pada pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

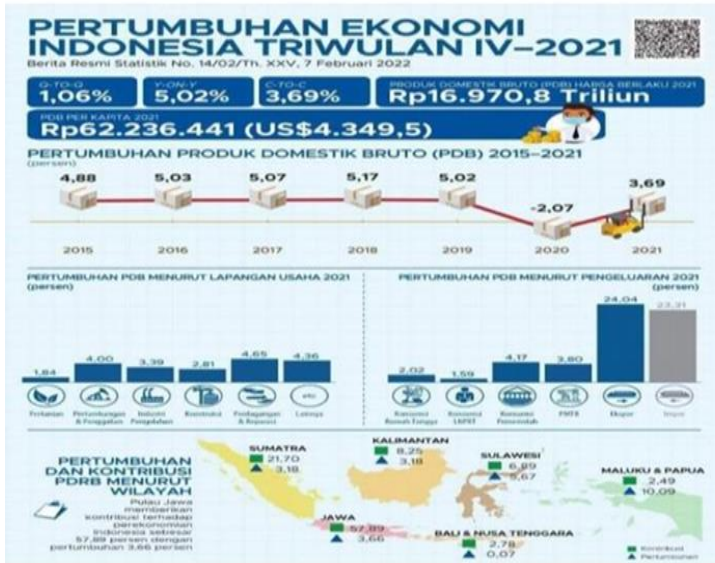
Pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan kalau tidak secepatnya diatasi secara hati-hati dapat mengakibatkan masalah yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah

terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. Akan tetapi dalam kenyataannya pertumbuhan yang tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2006). Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021 dapat dilihat pada tabel 1. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 62,2 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) )

**Gambar 1.1** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y on y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. 6 Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q to q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara

spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.



Sumber : BPS, 2022.

**Gambar 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022 yang mencapai 5,44% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% (yoy). Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan dalam negeri yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga,

dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan di seluruh wilayah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor dan impor. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya pergerakan masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% (yoy), terutama investasi bangunan, di tengah kinerja investasi non bangunan yang tetap baik. Sementara itu, konsumsi Pemerintah masih berkontraksi sebesar 5,24% (yoy) terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekspor tercatat meningkat sebesar 19,74% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Sementara itu, impor tumbuh tinggi sebesar 12,34% (yoy) sejalan dengan kinerja permintaan domestik dan ekspor yang membaik.

Dari sisi Lapangan Usaha, kinerja hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan II 2022 menunjukkan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, penyediaan

akomodasi dan makan minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan peningkatan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh peningkatan pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu distribusi pendapatan semakin merata. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Masalahnya kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masalah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus memberikan informasi yang banyaknya penduduk miskin di Indonesia (Suliswanto, 2010).

Setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Menurut TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dalam melaksanakan perkembangan nasional dikenal dengan adanya Triologi pembangunan yang memiliki 3 unsur yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Triologi pembangunan ini kita harus melihat ketiga unsur Triologi pembangunan tersebut saling mengkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat. Dengan pertumbuhan ekonomi justru kita dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, dan memang pertumbuhan ekonomi juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan lebih besar potensi yang mendorong pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita tidak dapat akan melaksanakan pemerataan pmbangunan dan pengentasan kemiskinan.

*Millenium Development Goals* (MDGks) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen Internasional untuk kemiskinan global. Ada delapan tujuan yang disepakati oleh PBB yaitu : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS malaria, dan penyakit penularan lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015 (Todaro & Smith, 2017).

Pada tanggal 25 september 2015, PBB melakukan perubahan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millineium Development Goals* (MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. ([www.id.UNDP.org](http://www.id.UNDP.org))

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Adapun 17 Tujuan SDGs yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan

11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa

Dalam tujuan SDGs dipilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan. ([www.id.UNDP.org](http://www.id.UNDP.org))

Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan berfokus dalam membangun daerah pinggiran. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastuktur di pedesaan. Besarnya dan transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar perdesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak yang putus sekolah. Untuk itu pemerintahan adalah hal yang ingin dilihat oleh semua orang dalam mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan harus

menyatu, membawa tata kelola yang lebih baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan tarap hidup masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono, 2013).

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah (Kurniawan, 2009).

United Nations development programe (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara di lihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja

yang di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Berikut tabel 1.1 menunjukkan data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia  
Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	28,59	11,22
2016	28,01	10,80
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41
2020	26,42	10,19
2021	26,50	9,71
2022	26,16	9,54

Sumber : BPS, 2022.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia masih di angka 10 digit. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta (11,22%), lalu pada tahun 2016 menjadi 28,01 juta atau 10,80% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 27,77 juta atau 10,64%. dan pada tahun 2018 penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 25,95 juta atau 9,82% dari total jumlah

penduduk Indonesia. Pada tahun 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau turun menjadi 9,41% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 26,42 juta jiwa atau 10,19%. Meningkatnya angka kemiskinan Indonesia disebabkan Covid-19 yang melanda Indonesia. Namun tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu tahun 2021 sebesar 26,50 juta jiwa atau sebesar 9,71% dan tahun 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau 9,54%. Banyak kebijakan yang telah pemerintah lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, namun tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutkan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa turun pada 2023 dengan sejumlah syarat salah satunya bisa menekan inflasi. Dengan demikian, dapat mencapai target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5% sampai 8,5% di tahun 2023.

Penekanan angka inflasi menjadi salah satu syarat menekan kemiskinan. Sebab, angka inflasi akan memengaruhi penghitungan garis kemiskinan dan pada muaranya akan mempengaruhi penghitungan dari jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan pada 2023 juga akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyerap atau menyediakan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada

titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus di bangun karena Sebagian besar penduduk Indonesia ada di desa. Masyarakat desa harus di posisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di Desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2022 ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )

**Gambar 1.3** Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021

Dapat dilihat dari gambar 1.3, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Alokasi Dana Desa tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Dana desa menjadi salah satu kebijakan di pemerintahan Jokowi. Total dana desa tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,75 triliun yang realisasi anggarannya rata-rata hampir mencapai 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 Dana Desa dikeluarkan sebesar 8,5% dari anggaran Transfer ke daerah. Dengan meningkatnya Dana Desa pada setiap tahun, diharapkan kualitas pembangunan desa juga bisa ditinggalkan baik infrastruktur desa maupun sumber daya manusianya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis

dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya.

Ekonomi Sumatera Utara menurut produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp859,87 triliun sepanjang 2021. Jika diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, perekonomian Sumatera Utara tumbuh 2,61% menjadi Rp547,65 triliun dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi 1,07%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi Covid-19 di mana ekonomi Sumatera Utara mampu tumbuh di atas 5%.

**Tabel 1.2**  
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara  
Tahun 2016-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
2016	5,18
2017	5,12
2018	5,18
2019	5,22
2020	-1,07
2021	2,61

Sumber : Databoks, 2022.

Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Sumatera Utara, yakni sebesar 50,79%. Diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan kontribusi 30,56%.

Komponen PMTB tumbuh 3,47% sepanjang tahun lalu, terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya. Setelahnya ada komponen pengeluaran pemerintah tumbuh 3,47%, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 1,69%.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 22,04% sepanjang 2021. Diikuti industri pengolahan dengan kontribusi 19,52%, serta perdagangan besar dan eceran 18,91%. Sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan terbesar, yaitu 6,51% pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diikuti jasa keuangan dan asuransi tumbuh 4,46%, serta sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 4,93%.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Sumatera Utara termasuk provinsi dengan anggaran dana desa terbesar diantara provinsi lainnya. Gambar 1.4 memberikan data jumlah anggaran dana desa di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2021 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

**Gambar 1.4** Anggaran Dana Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020

Pada tahun 2015 anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,46 triliun. Pada tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 3,29 triliun naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 4,19 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,87 triliun. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 4,45 triliun. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat kembali sebesar Rp 4,50 triliun.

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Utara. Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan anggaran dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**

Wilayah	Jumlah Desa	Anggaran Dana Desa (Miliar)			
		2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	204	126.570.894.000	146.090.415.000	150.506.325.000	152.083.710.000
Kab. Dairi	169	111.910.524.000	127.172.564.000	130.304.470.000	129.738.730.000
Kab. Deli Serdang	394	271.906.373.000	306.386.948.000	312.277.329.000	312.546.966.000
Kab. Karo	269	173.021.882.000	197.078.926.000	201.208.286.000	198.409.273.000
Kab. LabuhanBatu	98	60.371.923.000	70.226.102.000	72.182.696.000	74.477.417.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	73	46.205.735.000	61.548.371.000	65.076.224.000	67.788.110.000
Kab. Labuhanbatu Utara	90	68.036.521.000	79.123.527.000	83.576.158.000	86.022.841.000

Kab. Langkat	277	178.799.190.000	205.446.268.000	211.213.256.000	213.259.749.000
Kab. Mandailing Natal	407	252.910.057.000	285.841.420.000	290.920.103.000	286.845.864.000
Kab. Nias	170	148.261.931.000	180.585.127.000	181.381.215.000	179.544.025.000
Kab. Nias Utara	113	110.728.446.000	137.008.319.000	137.596.573.000	136.386.189.000
Kab. Nias Selatan	461	314.481.751.000	348.422.333.000	356.099.164.000	351.138.751.000
Kab. Nias Barat	105	92.269.401.000	114.000.248.000	118.531.988.000	117.397.253.000
Kab. Simalungun	413	259.232.136.000	294.442.204.000	298.689.733.000	296.800.840.000
Kab. Tapanuli Selatan	248	145.856.856.000	167.751.279.000	172.034.790.000	169.754.513.000
Kab. Tapanuli Tengah	215	121.058.197.000	140.541.973.000	144.349.335.000	142.631.022.000
Kab. Tapanuli Utara	252	164.129.846.000	184.186.164.000	194.621.304.000	192.016.817.000
Kab. Toba Samosir	244	154.311.189.000	176.101.238.000	179.571.269.000	177.074.852.000
Kab. Pakpak Bharat	52	40.948.983.000	48.298.630.000	50.424.120.000	50.970.983.000
Kab. Humbang Hasundutan	154	105.690.046.000	123.336.297.000	126.028.454.000	124.934.505.000
Kab. Serdang Bedagai	243	162.911.520.000	184.774.302.000	187.834.594.000	185.739.448.000
Kab. Samosir	134	90.921.937.000	108.744.499.000	109.313.044.000	107.929.748.000
Kab. Batu Bara	151	104.583.228.000	118.843.171.000	121.634.028.000	121.071.737.000
Kab. Padang Lawas	304	204.748.115.000	230.097.858.000	233.549.721.000	230.275.200.000
Kab. Padang Lawas Utara	388	254.318.741.000	287.244.660.000	293.516.929.000	289.345.427.000
Kota Gunungsitoli	101	77.009.849.000	89.077.769.000	90.367.394.000	89.308.308.000
Kota Padang Sidempuan	79	33.662.556.000	39.678.754.000	41.395.568.000	41.800.048.000
<b>Total</b>	<b>5.808</b>	<b>3.874.857.827.000</b>	<b>4.452.049.366.000</b>	<b>4.554.128.070.000</b>	<b>4.525.292.326.000</b>

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2022 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata di setiap kabupaten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, ini disebabkan oleh tujuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang bertujuan untuk kesejahteraan. Anggaran Dana Desa terbesar pada kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 351.138.751.000 dengan jumlah desa sebanyak 461 desa. Sedangkan anggaran yang terendah yaitu kota Padang Sidimpunaan sebesar Rp 41.800.048.000 dengan jumlah desa sebanyak 79 desa. Total dari anggaran Dana Desa 27 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,525 triliun. Disamping itu kabupaten Langkat dapat dikatakan Kabupaten dengan anggaran dana desa yang sedang melihat jumlah desanya sebanyak 277 desa dengan anggaran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemandirian masyarakat dan lain sebagainya.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara, 97° 52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 kelurahan definitif. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km<sup>2</sup> atau 17,59 persen

diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km<sup>2</sup> atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km<sup>2</sup> atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Sejak dimulainya program Dana Desa pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM adalah pengukuran perbandingan dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada

dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen.

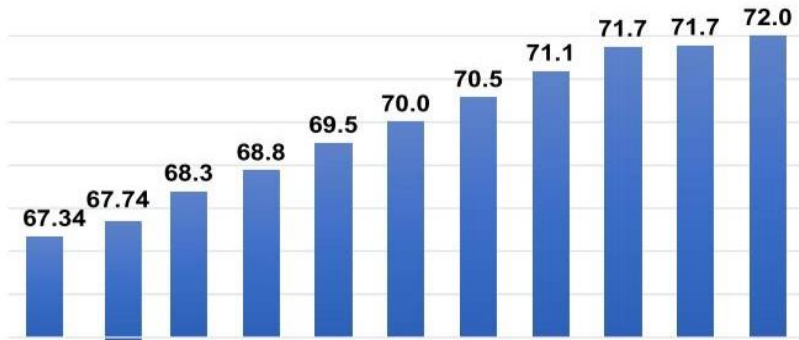


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1.5** Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 - 2021

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06

tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1.6** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara, 2011 – 2021

Pada gambar 1.6 menunjukkan bahwa IPM Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 72,00, dimana peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, IPM Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,3 persen dibandingkan capaian IPM tahun 2020.

Dapat dilihat dari tabel 1.4 perkembangan IPM kabupaten Langkat dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020, menunjukkan peningkatan dan berada pada status menengah atas. Akan tetapi masih

dibawah IPM Sumatera Utara. Jika dibandingkan perkembangan IPM Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, IPM Langkat meningkat akan tetapi peningkatannya tidak mengalami peningkatan tetap di peringkat 15.

**Tabel 1.4** IPM Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020

Tahun	IPM Kabupaten Langkat	IPM Propinsi Sumatera Utara
2010	64,57	67,09
2011	65,77	67,34
2012	66,18	67,74
2013	67,17	68,36
2014	68,00	68,87
2015	69,53	69,51
2016	69,13	70,00
2017	69,82	70,57
2018	70,27	71,18
2019	70,76	71,74
2020	71,00	71,77

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Langkat, IPM Langkat untuk tahun 2018 sebesar 70,27, meningkat sebesar 70,76 pada tahun 2019 dan tahun 2020 naik lagi menjadi sebesar 71,00. Pemerintah berharap kedepan akan terjadi peningkatan IPM kabupaten Langkat, untuk itu perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat. Walaupun pertumbuhan

ekonomi kabupaten Langkat masih tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan.

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan nasional adalah indeks kualitas hidup. Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality Of Life Index (PQLI)* digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.

Pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga, Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam Permendesa ini, prioritas penggunaan Dana Desa akan mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

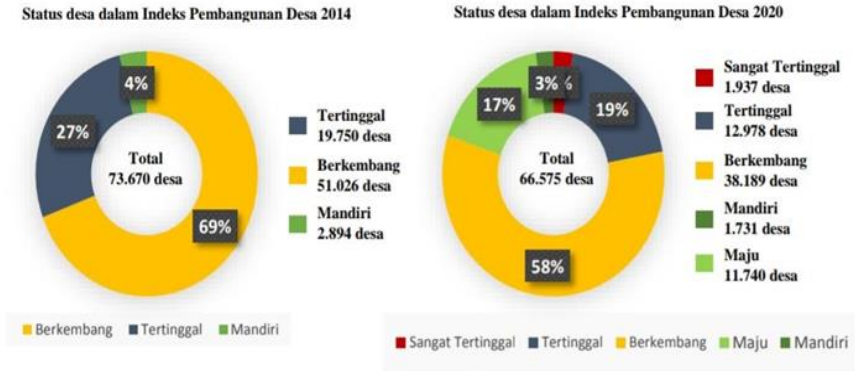
Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana Desa yang diberikan menjadi tiga bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBD. Terkhusus dari Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Riyadi, 2020). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Yanhar Jamaluddin, dkk, 2018). Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat perlu membuat pengukuran. Sehingga

dikeluarkan Permendes PDTTTrans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD dilaksanakan dua kali, dalam rangka perencanaan dan evaluasi. Untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat pembangunannya. Perbandingan Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2020 dapat dilihat pada gambar 7.

Berdasarkan data pada gambar 7, hasil publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.894 desa. Desa berkembang berjumlah 51.026 desa dan desa tertinggal berjumlah 19.750 desa. Pada tahun 2020 desa mandiri berjumlah 1.731 desa, desa maju berjumlah 11.740 desa, desa berkembang berjumlah 38.189 desa dan desa tertinggal berjumlah 12.978 desa, kemudian desa sangat tertinggal berjumlah 1.930 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi dan terpetakan menurut kondisi pembangunan desa.



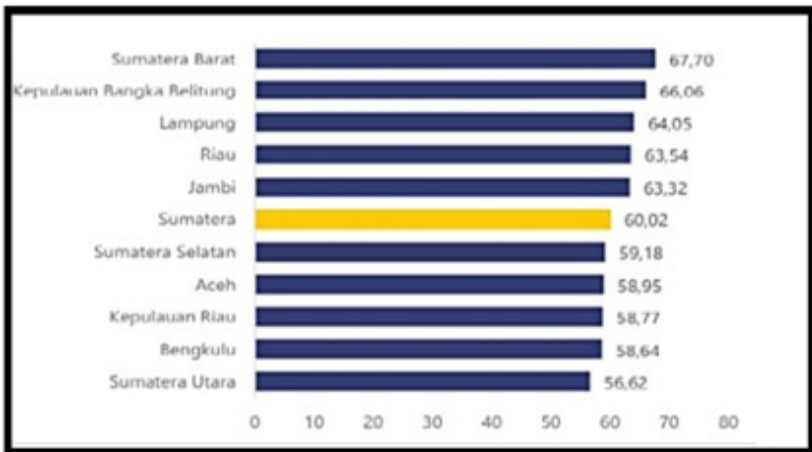
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1.7** Status Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2020

Namun untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2020, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2020. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan antara tahun 2014 dan 2020 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak tahun 2014 hingga tahun 2020. Sehingga wilayah desa dapat dilihat perkembangannya secara panel 2014 sebesar 73.670 desa dan 2020 sebesar 66.575 desa.

Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realistis pembangunan desa yang sesungguhnya dengan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa serta skala kriteria yang bertambah yaitu desa sangat tertinggal dan desa maju.

Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 ([www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id))

**Gambar 1.8** Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Pulau Sumatera Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.8 dapat diketahui kondisi perkembangan desa di Pulau Sumatera memiliki nilai IPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks 67,70, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 66,06 serta Provinsi Lampung dengan nilai 64,05. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah beradadi Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62. Sedangkan pada nilai rata-rata Indeks

Pembangunan Desa pula Sumatera yaitu sebesar 60,02 berada di atas rata-rata nasional atau terbesar ketiga setelah Jawa-Bali dan Pulau Sulawesi.

**Tabel 1.5**  
IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Sumber : BPS Indonesia, 2021 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Saat ini desa-desa di pulau Sumatera didominasi oleh desa-desa berkembang yaitu sekitar 81,88 persen dari total 23.241 unit desa. Sementara persentase desa mandiri sebanyak 4,79 persen (1.114 desa) dan desa tertinggal 13,33 persen (3.097 desa). Dilihat dari dimensinya/transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar yaitu 77,72 sedangkan dimensi kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil yaitu hanya 46,15.

Kondisi perkembangan desa di provinsi Sumatera Utara memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa sebesar 56,62437. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat

3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30 persen), sebanyak 200 desa mandiri (3,68 persen) dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02 persen) dalam kategori tertinggal. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, dimensi pelayanan umum sebesar 49,76, dan dimensi penyelenggaraan pemerintah sebesar 62,43.



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2021 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))  
**Gambar 1.9** IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Pada tahun 2018, rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke-4 dengan angka 66,41, sama seperti kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan untuk rata-rata nilai indeks terendah di provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66.

Hasil Indeks Pembangunan Desa (IPD) dapat memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi dan terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa.

Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial,

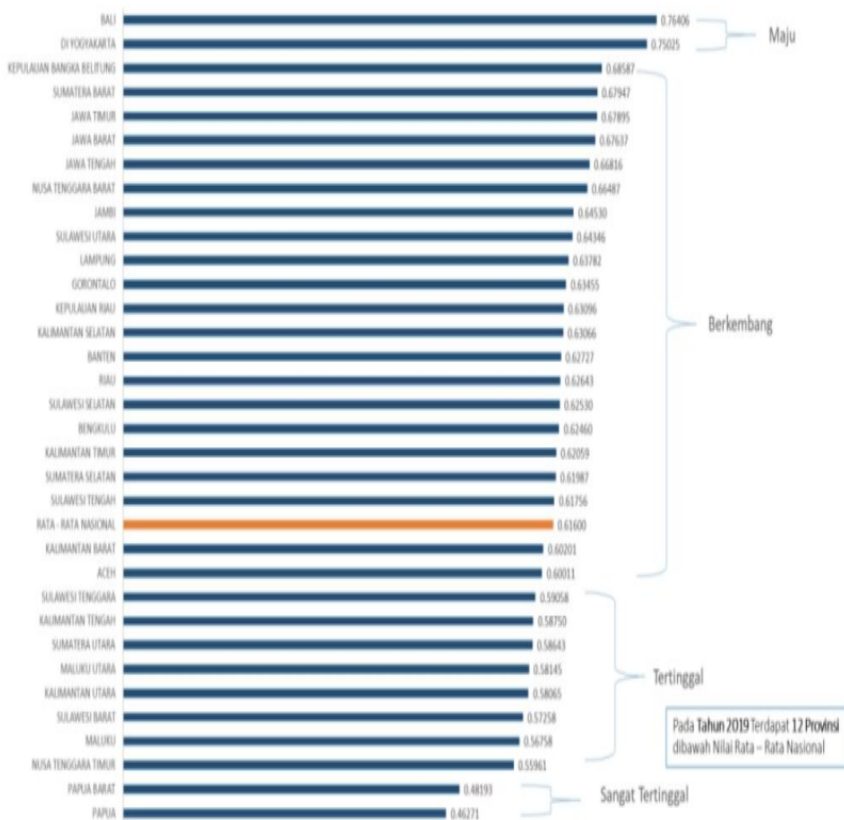
ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Dijelaskan Menteri Desa, "Indeks Desa Membanguna (IDM) ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini

strata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti : “(1) desa sangat tertinggal : < 0,491; (2) desa tertinggal : > 0,491 dan < 0,599; (3) desa berkembang : > 0,599 dan < 0,707; (4) desa maju : > 0,707 dan < 0,815; dan (5) desa mandiri : > 0,815” (Suroso, 2019). Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa.



Sumber : BPS, 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1.10** Rata-rata IDM Propinsi di Indonesia Tahun 2019

Perkembangan indeks desa membangun (IDM) menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan indeks pembangunan desa (IPD). Dimana desa sangat tertinggal dan tertinggal berkurang secara signifikan dan jumlah desa berkembang dan maju bertambah secara signifikan pula di tahun 2019. Pengurangan desa sangat tertinggal mencapai 6.616 desa, sedangkan desa tertinggal berkurang 12.991 desa. Sementara itu penambahan desa berkembang sebesar 15.723 desa dan desa maju bertambah 4.929 desa. Desa mandiri juga bertambah dari 174 desa menjadi 823 desa.

Pada gambar 1.10 menunjukkan bahwa nilai IDM terbesar terdapat di provinsi Bali dengan nilai 0,76406 yang memasuki kategori maju. Sedangkan nilai rata-rata nasional memiliki nilai sebesar 12 provinsi yang memiliki IDM dibawah nilai rata-rata atau tertinggal salah satunya termasuk provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 0,58643.

**Tabel 1.6.**  
**Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera  
 Utara Tahun 2019**

Provinsi/ Kabupaten	Average of IKS 2019	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kabupaten
SUMATRA UTARA	0.6581	0.4639	0.6373	0.5864	5,417	Tertinggal
Kota Padang Sidempuan	0.7480	0.5738	0.6429	0.6549	42	Berkembang
Labuhan Batu Selatan	0.7897	0.5609	0.6051	0.6519	52	Berkembang
Deli Serdang	0.7425	0.5440	0.6535	0.6467	380	Berkembang
Langkat	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	Berkembang
Asahan	0.7401	0.5250	0.6512	0.6388	177	Berkembang
Karo	0.7042	0.5382	0.6674	0.6366	259	Berkembang
Serdang	0.7399	0.5175	0.6523	0.6366	237	Berkembang

Begadai						
Batu Bara	0.7450	0.4991	0.6653	0.6364	141	Berkembang
Pakpak Barat	0.7304	0.5010	0.6757	0.6357	52	Berkembang
Simalungun	0.7116	0.5347	0.6561	0.6342	386	Berkembang
LabuhanBat u	0.7720	0.5096	0.6196	0.6337	75	Berkembang
Labuhan Batu Utara	0.7443	0.4876	0.6016	0.6112	82	Berkembang
Samosir	0.6899	0.4870	0.6417	0.6062	128	Berkembang
Humbang Hasundutan	0.6635	0.4832	0.6580	0.6016	153	Berkembang
Tapanuli Selatan	0.6761	0.4933	0.6123	0.5939	211	Tertinggal
Toba Samosir	0.6588	0.4841	0.6251	0.5893	231	Tertinggal
Dairi	0.6328	0.4870	0.6257	0.5818	161	Tertinggal
Padang Lawas	0.6122	0.4603	0.6506	0.5744	303	Tertinggal
Kota Gunung Sitoli	0.6107	0.4298	0.6783	0.5729	98	Tertinggal
Tapanuli Tengah	0.6175	0.4463	0.6302	0.5647	159	Tertinggal
Tapanuli Utara	0.6355	0.4453	0.6072	0.5627	241	Tertinggal
Mandailing Natal	0.6159	0.4539	0.6122	0.5607	377	Tertinggal
Padang Lawas Selatan	0.5851	0.4008	0.6358	0.5406	386	Tertinggal
Nias	0.5756	0.3287	0.6298	0.5114	170	Tertinggal
Nias Utara	0.5637	0.3281	0.6333	0.5084	112	Tertinggal
Nias Selatan	0.5321	0.3249	0.6311	0.4960	459	Tertinggal
Nias Barat	0.5439	0.3217	0.5416	0.4691	105	Sangat tertinggal

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021 ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Menurut tabel 1.6, pada tahun 2019 IDM Provinsi Utara memiliki 14 kategori Kabupaten berkembang, 12 kategori tertinggal dan 1 Kabupaten yang sangat tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kota Padangsidempuan dengan nilai 0.6549 yang termasuk kategori berkembang. Sedangkan kabupaten Langkat berada di peringkat ke-4 dengan memiliki nilai 0.6430 yang juga termasuk kategori berkembang. Dan IDM

yang berada di urutan terakhir yaitu kabupaten Nias Barat dengan nilai 0.4691 yang termasuk kategori desa sangat tertinggal.

Dapat dilihat IDM di kabupaten Langkat yang mempunyai kategori mulai dari kecamatan yang maju sampai tertinggal. Dapat dilihat pada tabel 7, tahun 2019 IDM kabupaten Langkat memiliki 19 kategori kecamatan yang berkembang dan 4 kategori kecamatan yang tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh kecamatan Bahorok dengan nilai 0,7053 yang termasuk kategori berkembang. Kecamatan yang memiliki nilai IDM terendah yaitu kecamatan Batang Serangan dengan Nilai IDM 0,5865 yang termasuk dalam kategori tertinggal sedangkan kecamatan Brandan Barat berada di urutan 3 (tiga) kebawah dengan nilai IDM 0.5914 dengan kategori tertinggal.

**Tabel 1.7.**  
**Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**di Kabupaten Langkat Tahun 2019**

Kabupaten/ Kecamatan	Average of IKS 2019	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kecamatan
LANGKAT	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	Berkembang
BAHOROK	0.7844	0.4648	0.8667	0.7053	18	Berkembang
SAWIT SEBERANG	0.8581	0.5306	0.6556	0.6814	6	Berkembang
BABALAN	0.8315	0.6250	0.5667	0.6744	4	Berkembang
PANGKALAN SUSU	0.7587	0.5815	0.6519	0.6640	9	Berkembang
STABAT	0.8667	0.5806	0.5445	0.6639	6	Berkembang
SECANGGANG	0.7664	0.6062	0.6125	0.6617	16	Berkembang
SEI BINGEI	0.7429	0.5756	0.6667	0.6617	15	Berkembang
BINJAI	0.7562	0.5028	0.7222	0.6604	6	Berkembang
SIRAPIT	0.7623	0.5433	0.6733	0.6597	10	Berkembang
WAMPU	0.7943	0.5154	0.6359	0.6485	13	Berkembang
SEI LEPAN	0.8000	0.4593	0.6815	0.6469	9	Berkembang
SALAPIAN	0.7297	0.5625	0.6375	0.6432	16	Berkembang
HINAI	0.7600	0.5458	0.6222	0.6427	12	Berkembang
GEBANG	0.7206	0.5000	0.7067	0.6424	10	Berkembang

SELESAI	0.7112	0.5397	0.6667	0.6392	13	Berkembang
TANJUNG PURA	0.7302	0.4935	0.6148	0.6128	18	Berkembang
BESITANG	0.7657	0.5306	0.6111	0.6358	6	Berkembang
PADANG TUALANG	0.7865	0.5303	0.5576	0.6248	11	Berkembang
KUALA	0.7253	0.5012	0.6095	0.6120	14	Berkembang
KUTAMBARU	0.7057	0.4542	0.6334	0.5977	8	Tertinggal
BERANDAN BARAT	0.7143	0.4467	0.6134	0.5914	5	Tertinggal
PEMATANG JAYA	0.6764	0.4167	0.6667	0.5866	8	Tertinggal
BATANG SERANGAN	0.7094	0.4405	0.6095	0.5865	7	Tertinggal

Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

Dapat dilihat pada tabel 1.8 nilai IDM di kecamatan Brandan barat yang mempunyai kategori mulai dari desa yang maju sampai desa tertinggal. Pada tahun 2019 IDM kecamatan Brandan Barat memiliki 1 kategori desa yang berkembang dan 4 kategori desa yang tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh desa Lubuk Kasih dengan nilai 0,6316 yang termasuk kategori berkembang. Dan desa yang memiliki nilai IDM terendah yaitu desa Sei Tualang dengan nilai IDM 0,5284 yang termasuk dalam kategori tertinggal. Begitu juga desa Perlis, Kelantan, Lubuk Kertang merupakan kategori desa tertinggal.

**Tabel 1.8.**  
 Nilai Indeks Desa Membangun IDM)  
 di Kecamatan Brandan Barat 2019

Kecamatan/Desa	Average of Nilai IDM	Status Kecamatan
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL
LUBUK KASIH	0.6316	BERKEMBANG
PERLIS	0.5852	TERTINGGAL
KELANTAN	0.5584	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.5412	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.5284	TERTINGGAL

Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada masa Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Membangun Indonesia dari pinggiran itu berarti desa harus dibangun karena sebagian besar penduduk Indonesia ada di desa. Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat desa diberi kewenangan untuk dapat mendefinisikan kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa harus menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa. Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan di desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasi (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

UU No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana bagi Hasil berperan sebagai penyeimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada tahun 2017, pemerintah pusat telah menganggarkan transfer ke daerah dan termasuk juga Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada

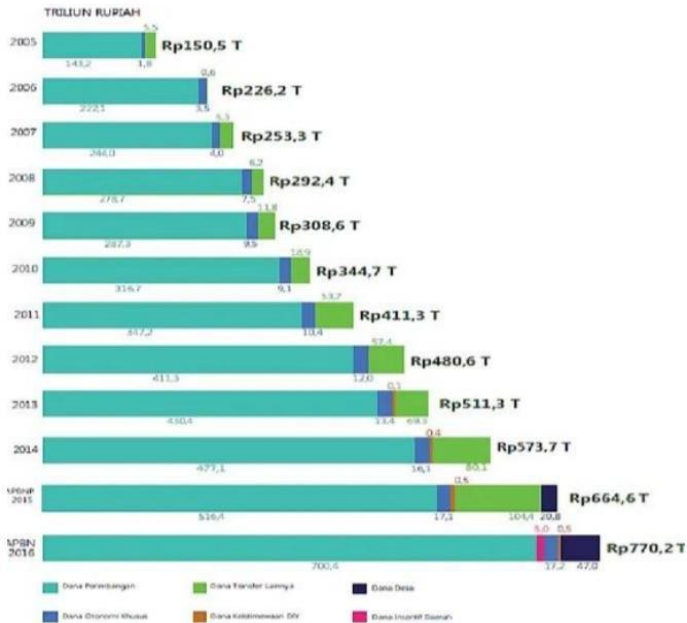
desa. Transfer ke daerah mencapai Rp 755,9 triliun meningkat dengan selisih Rp 10,3 triliun pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp 7662,2 triliun. Sedangkan untuk dana desa juga ikut meningkat yang awalnya hanya Rp 5,8 triliun menjadi Rp 60 triliun. Harapaannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

Beda pemerintahan berbeda pula fokus penggunaan atau alokasi anggaran. Perbedaan itu muncul dikarenakan adanya faktor eksternal maupun perbedaan kebijakan masing-masing pemerintahan. Perbedaan fokus alokasi anggaran ini setidaknya terlihat dari proporsi penggunaan anggaran antara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah berlangsung hampir lima tahun (2014-2019) dengan pemerintahan sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014).

Pada awal pemerintahannya, Jokowi-JK sudah memangkas subsidi bahan bakar minyak. Pemerintahan ini memilih merealokasikan anggaran subsidi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya, selain bidang pendidikan dan kesehatan. Karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Terutama pada masa pemerintahan Jokowi-JK pembangunan berfokus pada daerah pinggiran yaitu pedesaan.

Pada gambar 1.11, perkembangan dana transfer ke daerah meningkat jauh lebih pesat pada masa

pemerintahan Jokowi-JK. Pada era SBY rata-rata alokasi transfer daerah sebesar 32% dari total belanja negara. Di era Jokowi, rata-rata alokasi transfer daerah mampu ditingkatkan mencapai 36% dari total belanja negara.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2020 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

**Gambar 1.11** Perbandingan Transfer Ke Daerah Tahun 2005 – 2016

Transfer daerah juga difokuskan melalui Dana Otonomi Khusus atau Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan infrastruktur fisik yang dapat menambah daya saing daerah. Komitmen untuk mendukung pembangunan dari pinggiran juga dilaksanakan melalui implementasi Dana Desa pada 2015. Anggaran Dana Desa terus bertambah dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 47,0 triliun pada tahun 2016. Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa

pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



Sumber : Indonesia Baik, 2022 ([www.indonesiabaik.id](http://www.indonesiabaik.id))

**Gambar 1.12** Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018-2021

Salah satu komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan peningkatan jumlah alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) dalam jangka menengah. Sejalan dengan amanat UU Desa, jumlah alokasi TKD kemudian juga ditambah dengan komponen Dana Desa (DD) sejak tahun 2018. Bahkan jika dilihat dalam postur APBN 2021, alokasi belanja TKDD lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pusat.

Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun pada rancangan APBN 2021 (Lihat Gambar 11). Dana tersebut akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi di desa serta mendukung pengembangan sektor prioritas. Dengan anggaran Rp 796,3 triliun ini, terjadi penurunan alokasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan, transfer ke daerah terus meningkat. Dari Rp 766,2 triliun pada tahun 2018, Rp 826,77 triliun pada tahun 2019, hingga Rp 856,94 triliun pada tahun 2020.

Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa was was terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut (Kemendes PDTT, 2016).

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.273,29 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sejumlah 1.030.202 jiwa di tahun 2020. Laju

pertumbuhan penduduk di kabupaten Langkat antara tahun 2020-2021 adalah 0,61 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 1.034.519 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk kabupaten Langkat pada tahun 2020 mencapai 165 jiwa per kilometer persegi. Angka harapan hidup penduduk kabupaten Langkat pada tahun 2020 mencapai 68,80 dan naik di tahun 2021 menjadi 68,97. Indeks pembangunan manusia di kabupaten Langkat di tahun 2021 mencapai angka 71,35 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,00.

Pada pembahasan buku ini, penulis meneliti salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Langkat yaitu kecamatan Brandan Barat. Terdiri dari 5 desa yaitu: Kelantan, Perlis, Sei Tualang, Lubuk Kasih dan Lubuk Kertang. Kecamatan Brandan Barat memiliki luas wilayah 89,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 23,294 jiwa/km<sup>2</sup> dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 105,49, kecamatan Brandan Barat merupakan daerah dengan rasio jenis kelamin tertinggi yang memiliki makna bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Pada pengelolaan jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp 213.259.749.000. Jumlah tersebut dibagi rata dengan jumlah desa yang ada di kabupaten Langkat sebanyak 240 desa. Salah satu Kecamatan yang menerima dana desa adalah kecamatan Brandan Barat.

## **B. Permasalahan**

Adapun rumusan atau pertanyaan permasalahan dalam buku ini, di antaranya adalah:

1. Bagaimana perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan kecamatan Brandan Barat ?
2. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat sebelum kebijakan Dana Desa dan selama ada Dana Desa?
3. Bagaimana capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) kabupaten Langkat dan kecamatan Brandan Barat pada masa pemerintahan Jokowi?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Langkat Pasca Kebijakan Dana Desa ?
5. Bagaimana implementasi tata kelola penggunaan Dana Desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ?

## **C. Tujuan Pembahasan**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari bahasan ini adalah untuk :

1. Menganalisis perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat dan kecamatan Brandan Barat.
2. Menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat sebelum kebijakan Dana Desa dan selama ada Dana Desa.
3. Menganalisis capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) kabupaten Langkat dan kecamatan Brandan Barat pada masa pemerintahan Jokowi?
4. Mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat Pasca Kebijakan Dana Desa.

5. Menganalisis implementasi tata kelola penggunaan Dana Desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

## BAB 2

# PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income- GNI*) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan, seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2017).

Menurut Sukirno (2006), Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, taraf pendidikan serta teknologi semakin maju (Wildani Khotami, 2019).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

## A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

### 1. Teori Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini :

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan : (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang

sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

Adam Smith menekankan pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis bahwa karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. "Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan." Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian

tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## 2. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Maka pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengansumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dalam lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan (Jhingan, 2010).

### 3. Teori David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan tahun 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satupun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) "*law of diminishing return*" berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- 9) permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak

tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;

10) Terdapat persaingan yang sempurna;

11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, "Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan." Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010).

## **B. Teori Pembangunan Ekonomi Artur Lewis**

Teori pembangunan Arthur Lewis pada umumnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada.

Lewis mengansumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

### **1. Perekonomian Tradisional**

Teori Lewis mengansumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah rill ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

### **2. Perekonomian Industri**

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai pasif. Dengan

demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang akan meningkatkan output yang di produksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengansumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

### C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang menagalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2017).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa transisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan (Todaro & Smith, 2017).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan (Todaro & Smith, 2017).

#### **D. Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Keynesian**

Ekonomi Keyensian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini memerlukan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu *laize-faire* *capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dilakukan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, 2010).

### **E. Teori Pembangunan Ekonomi Harrod-Domar**

Teori ini dikembangkan oleh R. F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini Harrod-Domar memperluas

teori Keynes tentang keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk *menabung* (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capitaloutput ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang bisa atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan-bahan). Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan netto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengansumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal (K), dan total GDP (Y) misalnya, jika  $\$3$  dari modal selamanya

diperlukan untuk menghasilkan tambahan GDP tahun sebesar \$1 berarti setiap tambahan netto pada persediaan dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional (*national output*) yaitu GDP.

Misalkan hubungan ini, yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal-output (*capital-output-ratio*), kira-kira adalah 3 berbanding 1. Jika kita tetapkan rasio modal-output,  $k$ , dan selanjutnya kita andaikan juga bahwa rasio tabungan netto (*next savings ratio*),  $s$ , adalah bagian tetap output nasional (misalnya 6%) dan total investasi baru ditentukan oleh tingkat tabungan total, kita dapat membuat model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau ( $s$ ), dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \dots\dots (2.1)$$

2. Investasi neto ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut :

$$I = \Delta K \dots\dots (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal ( $K$ ), mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output ( $Y$ ), seperti telah ditunjukkan oleh Ekonomi Pembangunan rasio modal-output ( $c$ ), maka :

$$\frac{K}{Y} = c \dots\dots (2.3)$$

Atau

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = c \dots \dots (2.4)$$

Atau atau akhirnya

$$\Delta k = c \Delta y \dots \dots (2.5)$$

3. Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \dots \dots (2.6)$$

Dari persamaan (2.1) telah diketahui bahwa  $S = sY$  dan dari persamaan (2.2) dan (2.3), telah mengetahui bahwasanya :

$$I = \Delta k = c \Delta y \dots \dots (2.7)$$

Dengan demikian, kita dapat menuliskan "identitas" tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4) sebagai berikut:

$$S = sY = c \Delta Y = \Delta K = I \dots \dots (2.8)$$

Atau untuk menyederhanakannya menjadi :

$$sY = c \Delta Y \dots \dots (2.9)$$

Akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c} \dots \dots (2.10)$$

Perhatikan bahwa bagian kiri persamaan (2.10)  $\Delta Y/Y$ , merepresentasikan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP.

Persamaan (2.10) merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto,  $s$ , dan rasio modal-output nasional,  $c$  secara bersama. (Todaro & Smith, 2011).

## F. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) to SDG's

Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui dan digagas Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. Ketiga,

tujuan, target, dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs (UNDP, 2015).

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain (UNDP, 2015). Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.



## BAB 3

# TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

## A. Teori Pertumbuhan ekonomi Klasik

### 1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif,

dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

## 2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- 2) Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- 3) Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- 4) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- 5) Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

### 3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah penambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau penambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli riil (permintaan efektif) secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai

ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*) (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah; bukan pula oleh "kemalasan" penduduk. Kemiskinan itu ada sangkut-pautnya dengan kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali

tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan buat pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang diinvestasikan (Boediono, 2009).

## **B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max**

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang-kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasikan modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

### C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Perdagangan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani.

Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi

jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung kumulatif. Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi (Jhingan, 2010).

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier kapital (K). Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah  $\Delta Y = K\Delta I$ , dan  $1-1/K$  mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali  $K = 1/1-MPC$ . Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam "*General Theory*"-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada

para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejahter menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis, Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan (Jhingan, 2010).

## **D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik**

### **1. W.W. Rostow**

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul “*The Take- Off Into Self-Sustained Growth*” pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi

tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus (Boediono, 2009).

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern.

Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai 'teori modernisasi'. (Kuncoro M, 2000).

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu :

- 1) Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
- 2) Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*)
- 3) Proses Lepas landas (*The Take Off*)
- 4) Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
- 5) Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

## 2. Harrod Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis) (Boediono, 2009).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- 1) Perkonomian bersifat tertutup
- 2) Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang

dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ ).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n \dots(2-11)$$

Dimana :

$g = Growth$  (tingkat pertumbuhan output)

$K = Capital$  (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$  Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

## BAB 4

# PENDAPATAN NASIONAL, KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

### A. Pendapatan Nasional

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

Dalam arti sempit pendapatan nasional terjemahan langsung dari *National Income* (NI) yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB, PNB, Produk Nasional Netto dan *National Income* (NI) (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

Menurut Firdaus (2012), pendapatan nasional ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, maupun untuk masing-masing golongan dalam masyarakat.

Pendapatan nasional merupakan nilai yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara, salah satu tolak ukurnya dapat dilihat melalui *Gross Domestic Product* (GDP) (Coniq Putri Andinata, dkk, 2018).

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan Domestik bruto (Pendapatan nasional) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Pendapatan domestik bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan nasional bruto adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi domestik dan luar negeri dalam suatu periode tertentu (Andri Yanto, 2003).

*Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

#### a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan

laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

## **B. Kebijakan Fiskal**

Teori Kebijakan Fiskal muncul ketika kebijakan moneter tidak sanggup menanggulangi depresi yang melanda banyak negara di dunia pada tahun 1930-an. Teori ini didasarkan pada gagasan pemikiran John M Keynes dalam buku "*The General Theory Of Employment of Interest And Money*". Pada awalnya kebijakan ini hanya diarahkan untuk menghadapi masalah pengangguran, tetapi kemudian dipergunakan juga untuk mengatasi inflasi (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020). Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:

- Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola persebaran sumber daya
- Distribusi pendapatan

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui *Indische Comptabiliteitswet* tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

Secara garis besar tujuan kebijakan fiskal dapat digolongkan menjadi tiga bagian (Sri Endang Rahayu, dkk, 2020) yaitu:

1. Pertumbuhan kesempatan kerja penuh

Dengan cara mempertahankan kesempatan kerja penuh maka pemerintah dapat mencegah laju peningkatan angka pengangguran. meluasnya pengangguran dapat menyebabkan timbulnya gejolak sosial, menghambat laju pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya pendapatan nasional targetnya tidak tercapai.

## 2. Stabilitas harga

Stabilitas barang dan jasa harus tetap dijaga agar tidak terjadi fluktuasi secara drastis. Penurunan harga yang terus menerus dapat mematikan sektor bisnis dalam arti perusahaan banyak yang tutup sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Kenaikan harga yang terus menerus akan menyulitkan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segelintir pelaku bisnis saja.

## 3. Laju pertumbuhan potensial

Laju pertumbuhan yang lebih tinggi memerlukan modal dan tingkat kecenderungan menabung marginal yang lebih tinggi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Dan sebagai akibatnya terjadi tingkat konsumsi secara besar-besaran.

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan Ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :

1. Pembiayaan fungsional (*The functional finance*)

Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat menggali sumber penerimaan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
- b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
- c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri bentuk percetakan uang.

2. Pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan

penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

### 3. Stabilitas anggaran (*the stabilzing budget*)

Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.

Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

### 4. Pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti jumlah pengeluaran yang

disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Sehingga pemerintah tidak perlu berhutang, baik berhutang dari dalam negeri maupun keluar negeri.

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya :

#### 1. Pajak

Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

#### 2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluarannya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

#### 3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki *coupon rate* atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.

#### 4. Alokasi Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode

tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2006).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (*sentralisasi*) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah *eksternalitas* dan uang, yang kedua ialah *preferensi* (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

## C. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro.

### 1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 2009) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi

atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

### **1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin

besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2001).

## 2. Teori Adolf Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesoebroto, 2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wganer dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PPkP}{PPk1} < \frac{PkPPn}{PPk2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn} \dots (2.12)$$

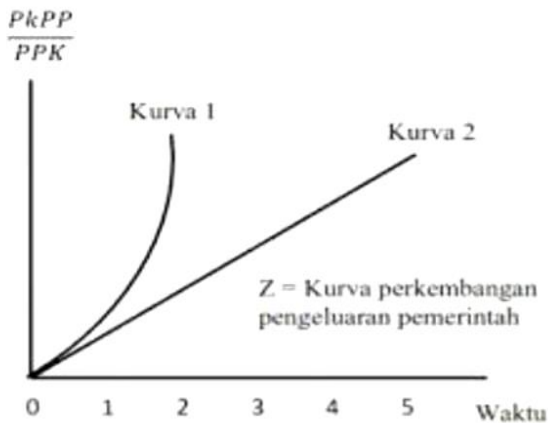
Dimana :

PPkP : Pengeluaran pemerintah

PPkp : Pendapatan perkapita (GDP/jumlah penduduk)

1,2,..n : Jangka waktu (tahun)

Gambar 4.1 menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.



Sumber : Mangkoesobro, 2001.

**Gambar 4.1.** Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

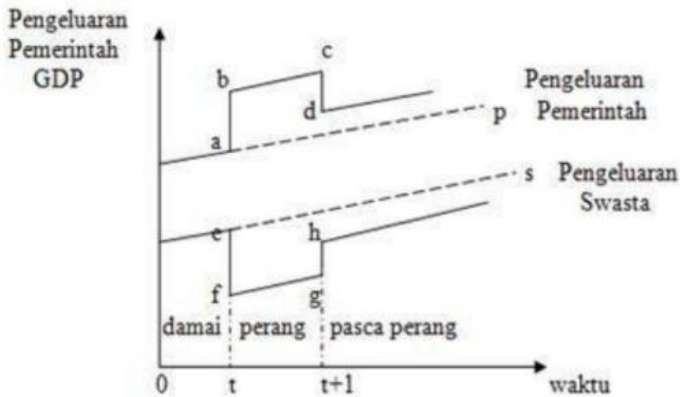
### c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak

yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :

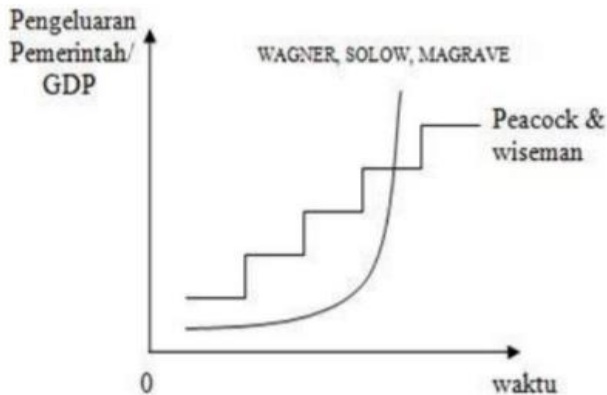


Sumber : Mangkoesobroto, 2001.

**Gambar 4.2** Kurva Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal,  $t$  ke  $t+1$ , pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun  $t$  terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun  $t+1$ , pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva dibawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Sumber : Mangkoesobroto, 2001.

**Gambar 4.3** Kurva Wagner, Solow, Dan Musgrave

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

## 2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan

menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoesobroto: 2001). Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(X, G) \dots (2.13)$$

Dimana :

$U_i = f(G, X)$

$G$  = vektor dari barang publik

$X$  = vektor barang swasta

$i$  = individu; = 1, ...,  $m$

$U$  = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu ( $i$ ) membutuhkan barang publik ( $K$ ) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $I$  barang  $K$  sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjaga keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots (2.14)$$

Dimana :

$U_p$  = fungsi utilitas

$S$  = keuntungan yang diperoleh politisi

$G$  = Vektor barang publik

$X$  = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots (2.15)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots (2.16)$$

Dimana :

$P$  = Vektor harga barang swasta

$X$  = Vektor barang swasta

$B_i$  = Basis pajak individu 1

$M_i$  = Total pendapatan individu 1

$t$  = Tarif Pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).



## BAB 5

# KEBIJAKAN DANA DESA DAN INDIKATOR KEMAJUAN DESA

### A. Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut,

maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

## **1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
- b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di

RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima :

- a) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- c) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- d) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima :

- a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50%. Capaian output paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut :

- a) Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
- b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## **2. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut :

### **a) Pasal 21**

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b) Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c) Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d) Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan 66 Ekonomi Pembangunan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e) Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ([www.Kemendes.go.id](http://www.Kemendes.go.id)).

## **B. Indikator Kemajuan Desa**

### **1. Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

Indeks Pembangunan Desa atau IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2018. Melalui komponen penyusunnya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 (lima) dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.

Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Sumber data pengukuran IPD memerlukan dua sumber data yakni daftar desa dan data desa. Daftar desa dan data desa yang digunakan pada penghitungan IPD

2018 bersumber dari hasil pendataan Podes 2018, dilakukan secara sensus di seluruh wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia.

Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas tersebut meskipun perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan pembanguna desa yang dipotret pada suatu waktu.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa terbagi menajdi 5 (lima) bagian:

### **1) Pelayanan Dasar**

Dimensi pelayanan dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas/Pustu, tempat praktek dokter, Poliklinik/Balai Pengobatan, tempat praktek bidan, Poskesdes, Polindes, dan Apotek.

### **2) Kondisi Infrastruktur**

Dimensi kondisi infrastruktur mewakili kebutuhan dasar, prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup:

- ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank;
- infrastruktur energi seperti listrik, penerangan jalan dan bahan bakar untuk memasak;
- ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta
- ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

### **3) Dimensi Aksesibilitas/Transportasi**

Dimensi aksesibilitas/transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi :

- ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti listrik dan kualitas jalan;
- aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan
- aksesibilitas transportasi seperti waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Bupati

dan biaya per kilometer transportasi ke Kantor Bupati.

#### **4) Dimensi Pelayanan Umum**

Dimensi pelayanan umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Variabel-variabel penyusunnya mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti penanganan kejadian luar biasa dan penanganan gizi buruk, serta ketersediaan fasilitas olahraga.

#### **5) Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dimensi penyelenggaraan pemerintahan mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa yang merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah pemerintah. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti kelengkapan Pemerintahan Desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa, serta kualitas SDM.

## **2. Indeks Desa Membangun (IDM)**

Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang

bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrta desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: "(1) desa sangat tertinggal:  $< 0,491$ ; (2) desa tertinggal:  $> 0,491$  dan  $< 0,599$ ; (3) desa berkembang:  $> 0,599$  dan  $< 0,707$ ; (4) desa maju:  $> 0,707$  dan  $< 0,815$ ; dan (5) desa mandiri:  $> 0,815$ " (Suroso, 2019). Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

- a) Indeks Ketahanan Sosial, terbagi menjadi 4 dimensi yaitu :
  1. dimensi Modal Sosial,
  2. dimensi Kesehatan,
  3. dimensi Pendidikan, dan
  4. dimensi Permukiman
- b) Indeks Ketahanan Ekonomi, terbagi menjadi 1 dimensi yaitu: dimensi Ekonomi
- c) Indeks Ketahanan Ekologi, terbagi menjadi 1 dimensi yaitu: dimensi Ekologi

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB 6

### PROSEDUR DAN KERANGKA ANALISIS

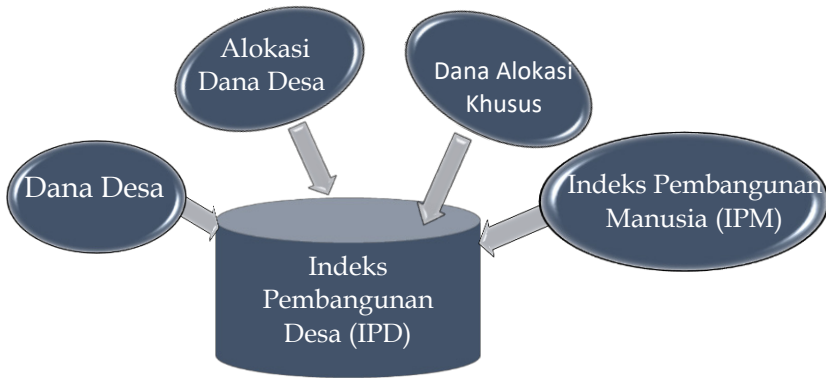
#### A. Kerangka Analisis

Penelitian ini menganalisis perkembangan dana desa di kabupaten Langkat kecamatan Berandan Barat. Kemudian menganalisis perkembangan indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat kecamatan Berandan Barat sebelum adanya kebijakan dana desa dan selama adanya dana desa. Dilanjutkan menganalisis capaian Indeks Desa Membangun (IDM). Setelah itu mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat pasca kebijakan dana desa. Dan yang terakhir menganalisis implementasi tata Kelola penggunaan dana desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir kecamatan Berandan Barat sehingga terlihat bagaimana kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Berikut kerangka analisis penelitian, dapat dilihat pada gambar 6.1.



**Gambar 6.1.** Kerangka Analisis Penelitian

## B. Kerangka Konseptual Model Estimasi



**Gambar 6.2.** Bagan Konseptual Model

Dalam Model ini, variabel Dana Desa, alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang dimana IPD merupakan variabel terikat.

## C. Pendekatan Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan juga menganalisis hubungan antar variabel yang sudah ditentukan untuk menjawab semua permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yaitu menggunakan data yang berbentuk kalimat verbal dan pendekatan kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan

adalah data data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang akan dihimpun mencakup wilayah di Indonesia.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 6.1.

**Tabel 3.1**  
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
IDM (Indeks Desa Membangun) dan IPD (Indeks Pembangunan Desa)	Tingkat kemajuan desa dalam (satuan persen)	Kementerian Desa <a href="http://www.kemendes.go.id">www.kemendes.go.id</a>
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementrian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh	Kementerian Keuangan RI <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>

	pemerintah Kab/Kota untuk kegiatan Desa dalam (satuan rupiah)	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Alokasi dana yang bersumber dari APBN kepada wilayah tertentu dalam satuan rupiah)	Kementerian Keuangan RI <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Tingkat kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan desa dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Pengelolaan Dana Desa	Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa	Kementrian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
Kesejahteraan Masyarakat	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara	BPS (Badan Pusat Statistik) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang di peroleh penulis langsung dari obyek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini. Data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil publikasi yang berasal dari website resmi.

Sumber data diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan menggunakan data dari sumber yang terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan langsung ke lapangan dengan melihat keadaan masyarakat di kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para responden yaitu pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan dana desa di kecamatan beradan Barat kabupaten Langkat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi terhadap pemerintah desa yang berada di kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat. Data yang diambil berupa data dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK), indeks pembangunan manusia (IPM), indeks desa membangun (IDM), indeks pembangunan desa (IPD).

## F. Populasi dan Sampel

### Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian

(Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pemerintah desa kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat.

## **Sampel**

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah Non-Probability Sampling dengan jenis Judgement Sampling. Judgement Sampling merupakan salah satu jenis dari Purposive Sampling, dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncooro, 2013).

Berdasarkan jumlah desa di kecamatan Brandan Barat kabupaten Langkat yaitu berjumlah 5 desa meliputi desa Lubuk Kasih, Perlis, Kelantan, Lubuk Kertang, Sei Tualang. Dari 5 desa tersebut peneliti memilih 2 desa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Desa yang dipilih yaitu: Desa Perlis, dan Kelantan. Alasan diambilnya kedua desa tersebut adalah : pertama, aktivitas perekonomian di desa tersebut terbilang tinggi karena dekat dengan pusat kecamatan. Kedua, Desa perlis dan Kelantan masuk kategori dengan anggaran dana desa terbesar di kecamatan Brandan Barat.

Setelah dilakukan pemilihan terhadap desa yang akan di teliti, maka peneliti menentukan jumlah sampel dari kedua desa yang telah ditentukan. Jumlah populasi dalam penelitian ini dari 2 (dua) desa yang telah ditentukan adalah

seluruh aparaturn pemerintah desa yang berjumlah 13 orang untuk dua desa. Dalam penelitian ini peneliti mempersempit populasi dengan cara menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan Teknik Slovin (Sugiyono, 2017). Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots (3.1)$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*) e

Maka :

$$n = \frac{26}{1 + 26(0,1)^2}$$

$$n = 20,6$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka sampel yang didapat berjumlah 21 orang (dibulatkan). Namun dalam hal ini peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana maka jumlah sampel yang telah disesuaikan yaitu 8 responden dibagi menjadi 2 desa yaitu Desa Perlis dan Desa Kelantan.

**Tabel 3.2.** Jumlah Sampel

No	Desa	Jumlah Sampel
		Aparatur Pemerintah Desa
1	Perlis	4
2	Kelantan	4
Total		8

## G. Teknik Analisis

### 1. Analisis Ekonomi Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perkembangan dan implementasi kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa, untuk menganalisis bagaimana perkembangan dan implementasi kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun serta menganalisis bagaimana implementasi tata kelola penggunaan dana desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir kecamatan Berandan Barat kabupaten Langkat.

### 2. Analisis Model Ekonometrika

#### a. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai dampak kebijakan Dana Desa terhadap indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 8 tahun (dari tahun 2014 – 2021), model

ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 ADD_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 IPM_t + \epsilon_t \dots (3. 2)$$

Dimana :

$IDM_t$  = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan %

$DD_t$  = Dana Desa pada tahun t

$ADD_t$  = Anggaran Dana Desa pada tahun t

$DAK_t$  = Dana Alokasi Khusus pada tahun t

$IPM_t$  = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun t

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien

t = Unit Waktu (2015 - 2020)

$\epsilon_t$  = *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan di atas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesis penelitian.

## b. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data-data runtun waktu (*time series*) dalam kurun waktu 8 tahun (dari tahun 2014 sampai 2021). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Squere*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple*

*regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern  $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern  $Var(\epsilon) = \sigma^2$
4. Covariance antar  $\epsilon$  dari setiap variabel bebas ( $x$ ) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) (Gujarati, 2013).

### c. Tahapan Analisis

#### 1) Penaksiran

##### a) Korelasi

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel Dana Desa (DD), Alokasi

Dana Desa (ADD), Dana alokasi Khusus (DAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD). Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf  $r$  dimana bervariasi antara  $-1$  sampai  $+1$ . Nilai  $r$  mendekati  $-1$  atau  $+1$  menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut nilai  $r$  yang mendekati  $0$  mengindikasikan lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda  $+$  (positif) dan  $-$  (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai  $+$  (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan DD, ADD, DAK dan IPM akan bersamaan dengan peningkatan IPD dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai  $-$  (negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan. Penurunan nilai DD, ADD, DAK, dan IPM akan bersamaan dengan penurunan IPD.

#### **b) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Gujarati (Kuncoro, 2013) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak

memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted  $R^2$  yang dirumuskan :

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - R^2 \cdot \frac{(n-1)}{(n-k)}$$

Dimana :

R: Koefisien Determinan

n : Jumlah simpel

k : Jumlah Variabel Independen

## 2) Pengujian

### a) Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai *estimator* yang diharapkan dapat memenuhi sifat *estimator* OLS yang BLUE (*Blue Liniear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

- **Multikolinearitas**

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi auxiliary maka di dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

- **Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setaip gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat

menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai  $R^2$  yang didapat digunakan untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability Observasion R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

- **Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabelgangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak acak. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4 - d_u$  maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

## BAB 7

# KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL KABUPATEN LANGKAT

### A. Kondisi Geografis

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis kabupaten Langkat berada pada  $3^{\circ}14'00''$  -  $4^{\circ}13'00''$  Lintang Utara,  $97^{\circ}52'00''$  -  $98^{\circ}45'00''$  Bujur Timur dan 4 - 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas  $\pm 6.263,29$  Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.



Sumber : <https://langkat.go.id>

**Gambar 7.1. Peta Wilayah Kabupaten**

Area kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain :

- Utara : berbatasan dengan provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- Timur : berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang dan kota Binjai

**Tabel 7.1**

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km <sup>2</sup>	%
1	Bahorok	1101.83	17.59
2	Sirapit	98.50	1.57
3	Salapian	221.73	3.54
4	Kutambaru	236.84	3.78
5	Sei Bingai	333.17	5.32
6	Kuala	206.23	3.29
7	Selesai	167.73	3.29
8	Binjai	42.50	2.68
9	Stabat	108.85	0.68
10	Wampu	194.21	1.74
11	Batang Serangan	899.38	3.10
12	Sawit Seberang	209.10	14.36
13	Padang Tualang	221.14	3.34
14	Hinai	105.26	3.53
15	Secanggih	231.19	1.68
16	Tanjung Pura	179.61	3.69
17	Gebang	178.49	2.87
18	Babalan	76.41	1.22
19	Sei Lapan	280.68	4.48
20	Brandan Barat	89.80	1.43
21	Besitang	720.74	11.51
22	Pangkalan Susus	151.35	2.42
23	Pematang Jaya	209.00	3.34
	Langkat	6263.74	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022.

Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km<sup>2</sup> atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km<sup>2</sup> atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km<sup>2</sup> atau 0,67 persen dari total luas wilayah kabupaten Langkat.

Seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari sampai dengan Agustus); Musim Hujan (September sampai dengan Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celsius - 30 derajat celsius.

Kabupaten Langkat berdasarkan topografinya memiliki ketinggian 0-3.010 meter di atas permukaan laut dpl. Wilayah ini terbagi menjadi daerah rawa, dataran rendah, daerah lipatan dan pegunungan. Puncak tertinggi berada di Gunung Bandahara yaitu 3.010 meter. Secara umum topografi kabupaten Langkat dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Pesisir dengan ketinggian 0 sampai 4 meter di atas permukaan laut dpl, yaitu meliputi kecamatan Secanggang, sebagian kecamatan Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Pangkalan Susu dan Besitang
- 2) Dataran rendah dengan ketinggian 4-300 meter dpl yang meliputi Kecamatan Stabat, Selesai, sebagian

- kecamatan Sei Binjai, sebagian kecamatan Tanjung Pura dan Padang Tualang
- 3) Dataran tinggi dengan ketinggian 300 meter dpl, meliputi sebagian kecil kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala dan sebagian kecamatan Sei Bingai.

## B. Kondisi Demografis

### 1. Jumlah Penduduk

**Tabel 7.2**

Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Langkat (Jiwa) Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Menurut Penduduk Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bahorok	21 489	21 392	42 878
2	Sirapit	8 623	8 498	17 121
3	Salapia	14 009	13 863	27 872
4	Kutambaru	7 324	7 098	14 442
5	Sei Bingai	26 015	26 166	52 181
6	Kuala	20 982	21 137	42 119
7	Selesai	37 591	37 114	74 705
8	Binjai	23 226	22 560	45 786
9	Stabat	43 907	44827	88 734
10	Wampu	22 129	21 533	43 662
11	Batang serangan	19 209	18 443	37 652
12	Sawit seberang	13 578	13 520	27 098
13	Padang Tualang	25 004	25 184	50 188
14	Hina	25 872	25 530	51 402
15	Secanggung	35 380	34 892	70 272
16	Tanjung Pura	34 982	34 379	69 361
17	Gebang	23 056	22 686	45 742
18	Babalan	30 880	29 795	60 675
19	Sei Lapan	25 635	24 713	50 348
20	Brandan Barat	12 112	11 488	23 600
21	Besitang	23 878	23 402	47 280
22	Pangkalan Susu	22 475	22 228	44 703
23	Pematang Jaya	7 128	6 846	13 974
	<b>Langkat</b>	<b>524.481</b>	<b>517.294</b>	<b>1.041.775</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2021 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dari data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Langkat pada tahun 2019 tercatat 524.481 jiwa penduduk laki-laki dan 517.294 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kecamatan Stabat dengan jumlah penduduknya 88.734 jiwa. Dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Pematang Jaya dengan 13.974 jiwa. Kecamatan Brandan Barat memiliki jumlah penduduk yaitu 23.600 dengan jumlah rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 12.112 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 11.488 jiwa, sehingga terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan melalui setiap kecamatan, terlihat kecamatan Brandan Barat memiliki jumlah penduduk yang sedang atau tidak terlalu padat.

## 2. Tenaga Kerja

**Tabel 7.3**

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15 - 19	19.336	7.164	26.500
20 - 24	30.957	21.852	52.809
25 - 29	32.028	17.989	50.017
30 - 34	42.521	40.476	82.997
35 - 39	38.327	21.357	59.684
40 - 44	29.236	24.680	53.916
45 - 49	32.970	21.916	54.886
50 - 54	19.119	19.087	38.206
55 - 59	11.931	6.080	18.011
60 +	27.359	9.910	37.269

Sumber : BPS Kab. Langkat ( [www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id) )

Dari data pada tabel 4.3 menunjukkan tingkat usia kerja 30-34 tahun paling banyak untuk laki-laki sebesar 42.521 jiwa dan usia kerja untuk perempuan sebesar 40.476 jiwa. Total pekerja di kabupaten Langkat usia 15-60 tahun keatas yaitu 37.269 jiwa. Selain itu kerja 15 tahun keatas sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat yang bekerja menurut jenis kegiatan utama dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini :

**Tabel 7.4**  
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut  
Jenis Kegiatan Tahun 2015

Jenis Kegiatan	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>298.448</b>	<b>155.902</b>	<b>454.350</b>
1. Bekerja	277,631	140,275	417,906
2. Pengangguran Terbuka	20,817	15,627	36,44
- Pernah Bekerja	2,771	4,281	7,052
- Tidak Pernah Bekerja	18,046	11,346	29,392
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>54.080</b>	<b>195.872</b>	<b>249.955</b>
1. Sekolah	25,652	32,942	58,594
2. Mengurus Rumah Tangga	2,549	151,012	153,561
3. Lainnya	25,879	11,921	37,800
<b>Jumlah Penduduk 15+</b>	<b>352.528</b>	<b>351.777</b>	<b>704.305</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	84.66	44.32	64.51
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.98	10.02	8.02

Sumber : BPS Kab. Langkat, 2016 ([www.langkatbpas.go.id](http://www.langkatbpas.go.id))

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di kabupaten Langkat pada tahun 2015 tercatat 454.350 jiwa dengan rincian 298.448 jiwa angkatan kerja laki-laki dan 155.902 jiwa angkatan kerja perempuan. Sedangkan pada jumlah bukan angkatan kerja 249.955 jiwa dengan rincian 54.080 jiwa bukan angkatan kerja laki-laki dan 195.875 jiwa bukan angkatan kerja perempuan.

### **C. Kondisi Pemerintahan**

Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan dan 277 desa dimana luas kecamatan terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km<sup>2</sup> atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km<sup>2</sup> atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai. dengan luas 42,05 km<sup>2</sup> atau 0,67 persen dari total luas wilayah kabupaten Langkat.

Sedangkan Jumlah desa yang terbanyak berasal dari kecamatan Bahorok dan Tanjung Pura dengan jumlah 19 desa diikuti kecamatan Salapian dan Secanggang dengan jumlah 17 desa. Sedangkan desa yang memiliki jumlah desa terendah yaitu Binjai dengan jumlah 5 desa.

Tabel 475 memperlihatkan jumlah kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.

**Tabel 7.5.****Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
1	Bahorok	1 101,83	19	Pekan Bahorok
2	Serapit	98,50	10	Serapit
3	Salapian	221,73	17	Minta Kasih
4	Kutambaru	236,84	8	Kutambaru
5	Sei. Bingei	333,17	16	Namu Ukur
6	Kuala	206,23	16	Pekan Kuala
7	Selesai	167,73	14	Pekan Selesai
8	Binjai	42,05	7	Kwala Begumit
9	Stabat	108,85	12	Stabat Baru
10	Wampu	194,21	14	Bingai
11	Batang Serangan	899,38	8	Batang Serangan
12	Sawit Seberang	209,10	7	Sawit Seberang
13	Padang Tualang	221,14	12	Tanjung Selamat
14	Hinai	105,26	13	Tanjung Beringin
15	Secanggang	231,19	17	Hinai Kiri
16	Tanjung Pura	179,61	19	Pekan Tanjung
17	Gebang	178,49	11	Pekan Gebang
18	Babalan	76,41	8	Pelawi Utara
19	Sei. Lapan	280,68	14	Alur Dua
20	Brandan Barat	89,80	7	Tangkahan Durian
21	Besitang	720,74	9	Pekan Besitang
22	Pangkalan Susu	151,35	11	Pangkalan Susu
23	Pematang Jaya	209,00	8	Pematang Jaya
<b>Jumlah</b>		<b>6263,29</b>	<b>277</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Langkat , 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

## **D. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat dilihat dari nilai PDRB dan PDRB per Kapita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan PDRB perKapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah.

### **1. Nilai PDRB**

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan daerah yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Kabupaten Langkat. Caranya dengan distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong distribusi yang lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum terdapat empat sektor dalam pembentukan PDRB kabupaten Langkat yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, jasa dan hotel. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

**Tabel 7.6.**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Langkat  
(Milyar Rupiah) 2019-2021

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12 737,61	12 872,40	13 359,53
B. Pertambangan dan Penggalan	2 931,33	2 868,05	2 987,88
C. Industri Pengolahan	4 140,11	4 060,39	4 152,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	69,61	71,11	73,28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,71	12,12	12,78
F. Konstruksi	2 179,25	2 083,69	2 148,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	2 878,38	2 807,03	2 877,87
H. Transportasi dan Pergudangan	642,40	582,16	578,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641,66	593,87	601,37
J. Informasi dan Komunikasi	416,43	456,35	483,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	543,40	544,55	565,98
L. Real Estat	813,08	816,37	817,54
M,N. Jasa Perusahaan	153,78	145,59	145,38
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	877,23	872,90	871,64
P. Jasa Pendidikan	357,48	359,19	372,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,80	142,20	142,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	29 597,77	29 343,26	30 247,39
Produk Domestik Regional Bruto			

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkatbps.go.id](http://www.langkatbps.go.id))

Pada tabel 7.6 menggambarkan distribusi persentase PDRB kabupaten Langkat menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2021. Berdasarkan Tabel selama kurun waktu tahun 2019-2021 sektor jasa lainnya yang memberikan sumbangan terbesar pada PDRB kabupaten Langkat. Kemudian sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten Langkat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setiap tahunnya sektor ini terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB kabupaten Langkat.

Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 12 737,61 milyar, di tahun berikutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga pada tahun 2021 sebesar Rp 13.359,53 milyar. Tingginya kontribusi sektor pertanian di kabupaten Langkat karena berdasarkan topografi wilayahnya dan daerah potensial dijadikan sebagai tanah pertanian dan perkebunan. Kemudian sektor perikanan di kabupaten Langkat juga memenuhi kebutuhan di kabupaten dan daerah lainnya sehingga kegiatan perikanan mempunyai potensi yang cukup besar. Produksi perikanan kabupaten Langkat tercatat 55.618,48 ton yang berasal dari 29.559,92 ton perikanan tangkap dan 26.058,48 ton yang berasal dari Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah nelayan dan pengelolaan ikan yang cukup banyak di kabupaten Langkat karena daerah yang dekat dengan wilayah pesisir. Dari 23 kecamatan di kabupaten Langkat salah satu kecamatan penghasil pertanian dan perikanan adalah kecamatan Brandan Barat.

Selanjutnya sektor yang minim memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Langkat adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor yang trendnya mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 11,71 milyar terhadap kabupaten Langkat, meningkat menjadi Rp 12,12 milyar di tahun 2020. Pada tahun 2021 sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan sebesar Rp 12,78 milyar dari tahun sebelumnya.

## **2. PDRB PerKapita**

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Pada tahun 2021, PDRB perkapita Kabupaten Langkat mencapai 44,76 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 6,57 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2017-2021 berturut-turut sebesar 7,83 persen, 6,92 persen, 5,99 persen, 1,02 persen, dan 6,57 persen.

**Tabel 7.7.**

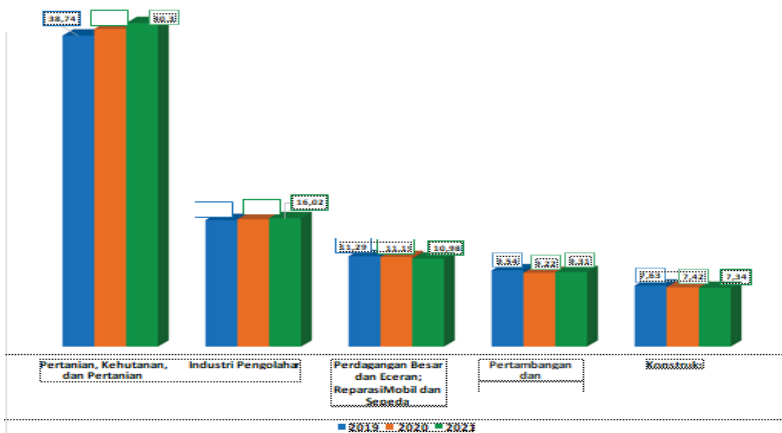
PDRB PerKapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)
	Harga Berlaku (Milyar Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	37 032,25	36 012,77	7,83
2018	39 867,65	38 504,18	6,92
2019	42 515,18	40 770,60	5,99
2020	43 208,00	41 997,10	1,02
2021	46 301,20	44 756,26	6,57

Sumber : PDRB Kab. Langkat, 2022 ([www.langkatkab.bps.go.id](http://www.langkatkab.bps.go.id))

### 3. Struktur Ekonomi

Gambar 7.2 adalah struktur produk domestik regional bruto pengeluaran lapangan usaha. Struktur perekonomian kabupaten Langkat pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 40,30 persen; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,02 persen; serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,98 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 67,30 persen terhadap total PDRB.

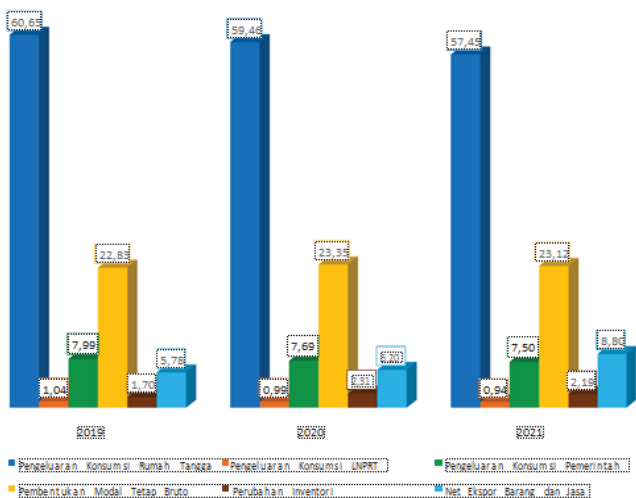


Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 7.2** Struktur PDRB beberapa Pengeluaran Lapangan Usaha

Berdasarkan pendekatan produksi pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,93 persen disusul oleh lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42 persen.

Gambar 7.3 menunjukkan pertumbuhan produk domestik regional bruto beberapa komponen pengeluaran.



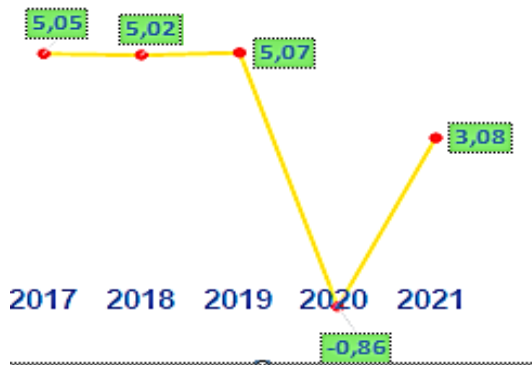
Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))  
**Gambar 7.3.** Struktur Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen

Struktur ekonomi Langkat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2010 tidak menunjukkan perubahan yang berarti/ aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hampir mencakup separuh PDRB Langkat yaitu sebesar 57,45 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto 23,12 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,50

persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 0,94 persen, Perubahan Inventori 2,19 persen dan Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,80 persen.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Berikut laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Langkat tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 7.4 berikut ini:



Sumber : BPS Kab. Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

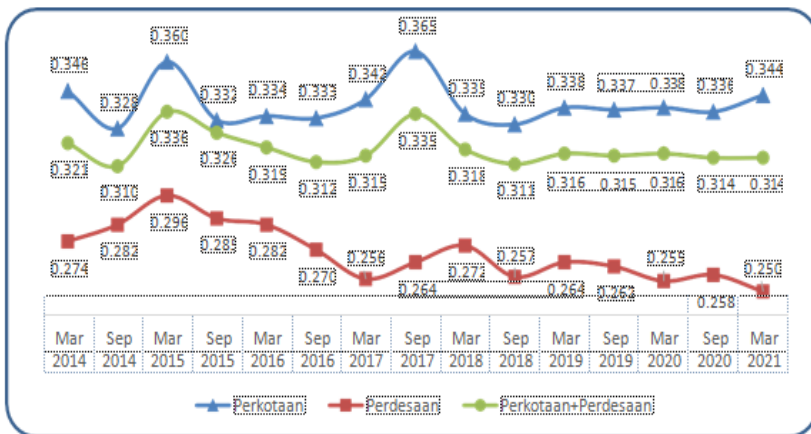
**Gambar 7.4** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021

Perkonomian kabupaten Langkat tahun 2021 meningkat 3,80 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 0,86 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian di kabupaten Langkat semakin membaik walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 5,93 persen. Diikuti oleh lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42 persen, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,18 persen. Lapangan usaha

transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi 0,55 persen, lapangan usaha jasa perusahaan mengalami kontraksi 0,15 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami kontraksi masing-masing 0,14 persen.

## 5. Gini Ratio

Pada Maret 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) *Gini Ratio* Sumatera Utara tercatat sebesar 0,314. Tidak terjadi perubahan *Gini Ratio* pada maret 2021 terhadap September 2020. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,344 sedikit meningkat dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,336. Sebaliknya, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,250 menurun dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,258.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2022 ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

**Gambar 7.5** Perkembangan *Gini Ratio* Sumatera Utara Maret 2014 – Maret 2021

Perkembangan *gini ratio* di Sumatera Utara tersaji pada gambar 4.5. Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,78 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,65 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Sumatera Utara pada bulan Maret 2014 tercatat sebesar 0,321. Selama periode Maret 2014 hingga Maret 2021, nilai *Gini Ratio* cukup berfluktuasi, dengan *Gini Ratio* Maret 2015 sebesar 0,336 merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Berhasil mencapai titik 0,312 pada September 2016, namun kembali mengalami peningkatan pada September 2017 menjadi 0,335. Berhasil turun kembali hingga ke 0,311 pada September 2018, akan tetapi kembali meningkat menjadi 0,317 pada Maret 2019. Sempat turun ke angka 0,315 namun kembali naik ke angka 0,316 di Maret 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, namun mampu melandai kembali hingga tercatat sebesar 0,314 pada Maret 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,344. Angka ini naik sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,338. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2021 tercatat sebesar 0,250.

Berbeda dengan daerah perkotaan, angka *Gini Ratio* daerah perdesaan justru turun sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,258.

## 6. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab penganggura adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS 2021, jumlah sarjana pengangguran di kabupaten Langkat berada pada kisaran angka 4.419 jiwa. Dengan luasan wilayah, potensi sumber daya yang ada, baik BUMS, BUMN, Dana Desa, Program UMKM dan lain sebagainya.

**Tabel 7.8**

Jumlah Pengangguran di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
<b>Jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas (jiwa)</b>	20.579	37.864	27.601
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun kaatas (persen)</b>	5,30	7,20	5,12

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2022 ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

Tabel 7.8 adalah data tingkat pengangguran berdasarkan jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas dan tingkat pengangguran terbuka penduduk 15 tahun keatas. Tabel 7.8 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas pada tahun

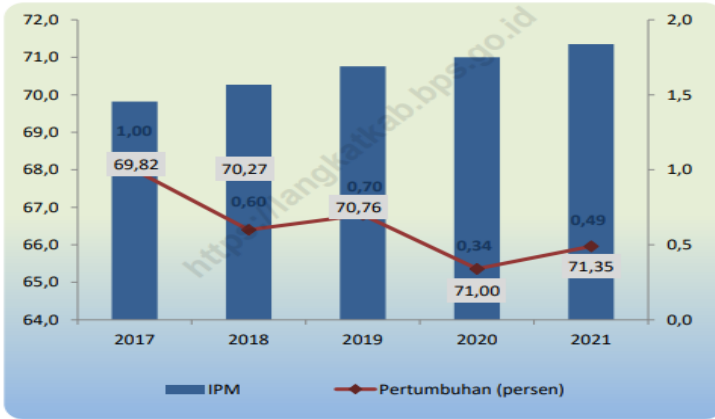
2021 berjumlah 27.601 menurun 10.263 jiwa dari tahun 2020 yang jumlahnya 37.864 jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 berjumlah 5,12 turun menjadi 2,08 persen dari tahun 2020 yang jumlahnya 7,20 persen.

## **E. Kondisi Sosial**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM kabupaten Langkat tahun 2016 sebesar 69,13 persen terus meningkat menjadi 71,35 persen pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM kabupaten Langkat terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,63 persen per tahun.

Pada gambar 7.6 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Langkat. Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2017 hingga 2021. Beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, tujuh kabupaten/kota mencatat perkembangan paling cepat selama 2017 hingga 2021 yaitu di atas 4 persen. Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat yaitu kabupaten Nias Selatan, kabupaten Nias Barat, kabupaten Nias, kabupaten Nias Utara, kabupaten Humbang Hasundutan, kota Gunung Sitoli, dan kabupaten Mandailing Natal.

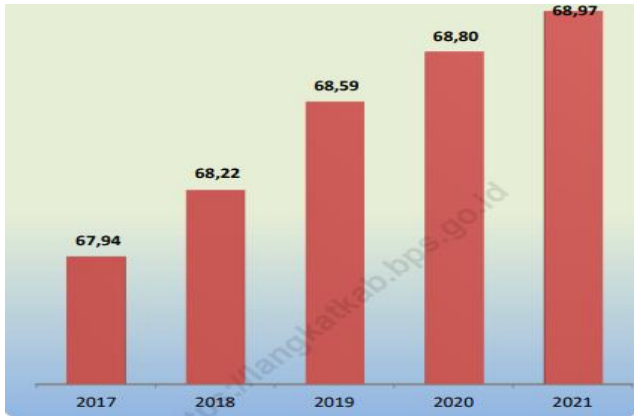


Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 7.6** Perkembangan IPM Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021

### a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator AHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Perkembangan harapan hidup di kabupaten Langkat dapat dilihat pada gambar 7.7 berikut ini.



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 7.7** Perkembangan Harapan hidup Kabupaten Langkat 2017-2021

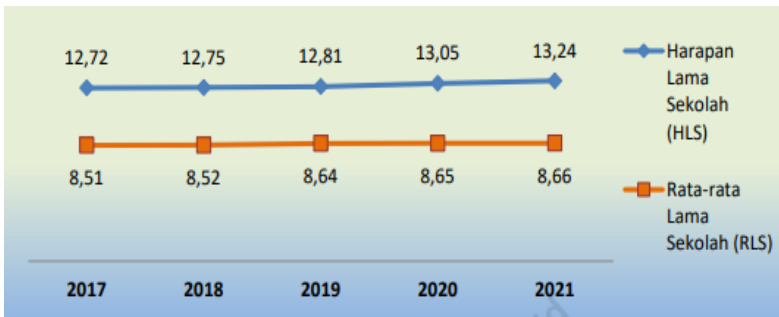
Gambar 7.7 memperlihatkan perkembangan AHH kabupaten Langkat selama tahun 2017-2021. Pada gambar 7.7 tersebut terlihat bahwa AHH kabupaten Langkat selama periode 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. AHH kabupaten Langkat pada tahun 2021 mencapai 68,97 tahun. Berarti setiap bayi di kabupaten Langkat yang dilahirkan pada tahun 2021, dapat berharap untuk hidup sampai usia 68,97 tahun. Selama tahun 2017-2021, angka harapan hidup saat lahir di kabupaten Langkat tumbuh rata-rata 0,34 persen per tahun.

#### **b. Rata-Rata Lama Sekolah**

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

Gambar 7.8 menunjukkan perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat. Sampai dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten Langkat telah mencapai 8,66 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,24 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di kabupaten Langkat selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Pada tahun 2017, harapan lama sekolah di kabupaten Langkat sebesar 12,72 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 13,24 tahun pada tahun 2021. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 sebesar 8,51 tahun meningkat hingga 8,66 tahun pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah tumbuh 0,99 persen per tahun lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang sebesar 0,43 persen per tahun.



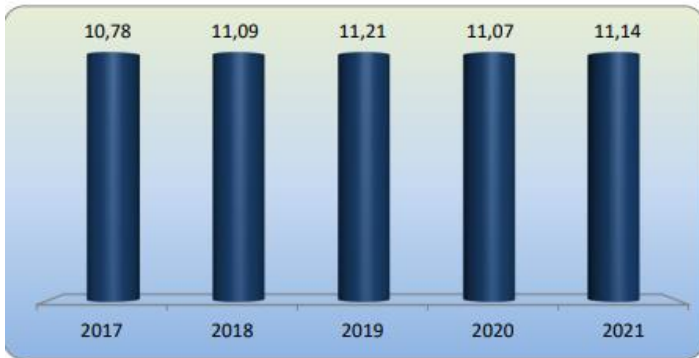
Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 7.8** Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021

### c. Kemampuan Daya Beli

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah kabupaten memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Medan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Berikut perkembangan pengeluaran per kapita per tahun kabupaten Langkat tersaji pada gambar 4.9.



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 7.9** Perkembangan Pengeluaran Per kapita Per Tahun Kabupaten Langkat Tahun 2017 - 2021

Tahun 2021, pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Langkat telah mencapai 11,14 juta per tahun. Pada tahun 2017, tingkat daya beli masyarakat kabupaten Langkat sebesar 10,78 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 11,14 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2021. Kemampuan daya beli masyarakat kabupaten Langkat selama periode 2017-2021 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,34 persen per tahun. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Langkat meningkat dibanding tahun 2020.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Langkat dan untuk melihat garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di kabupaten Langkat dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini :

**Tabel 7.9**

Angka Kemiskinan Di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021

Angka Kemiskinan	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	103,08	101,87	106,59
Persentase	9.91	9.73	10.12
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	392050.00	412422.00	432371.00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.90	1.52	1.17
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.14	0.33	0.23

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dilihat dari Tabel 4.9 jumlah penduduk miskin di kabupaten Langkat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 101,87 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 103,08 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 106,59 ribu jiwa atau menjadi sebesar 10,12% dari total jumlah penduduk di kabupaten Langkat. Persentase penduduk miskin di kabupaten Langkat terus dilakukan upaya penurunannya oleh pemerintah kabupaten agar tidak terjadinya ketimpangan sosial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun kebijakan pemerintah yang menyangkut kemiskinan juga berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan.



## BAB 8

# IMPLEMENTASI TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

### A. Analisis Perkembangan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya

operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui :

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi :
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;

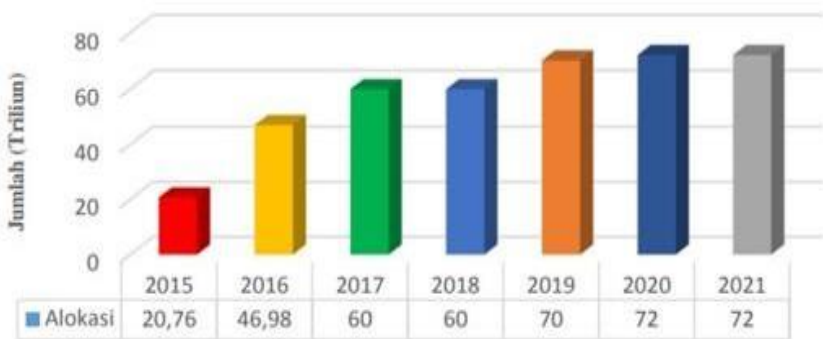
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
  - Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

## **1. Anggaran Dana Desa Menurut Tingkat Nasional**

Berikut gambar 8.1 yang memperlihatkan anggaran Dana Desa menurut tingkat Nasional tahun 2015-2021.

### Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021 (Triliun)



Dana Desa 2015-2021 Rp 401,74 Triliun

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Sumber : Kementerian Keuangan RI ( [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) )

**Gambar 8.1** Anggaran Dana Desa Nasional  
Tahun 2015-2021

Dapat dilihat pada gambar 4.10, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Alokasi Dana Desa tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata per desa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933

juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Sejak adanya dana desa untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat pembangunannya.

## **2. Anggaran Dana Desa Propinsi Sumatera Utara**

Anggaran Dana Desa Sumatera Utara tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar 4.11. Pada tahun 2015 anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,46 triliun. Pada tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 3,29 triliun naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 4,19 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,87 triliun. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 4,45 triliun. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat kembali sebesar Rp 4,50 triliun.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2021 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

**Gambar 8.2** Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2020 (Triliun)

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada setiap Provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Utara. Berikut gambar 28 yang memperlihatkan perkembangan anggaran dana desa setiap kabupaten atau kota di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 8.1**  
**Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera**  
**Utara Tahun 2019 – 2021**

Wilayah	Jumlah Desa	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	204	126.570.894.000	146.090.415.000	150.506.325.000	152.083.710.000
Kab. Dairi	169	111.910.524.000	127.172.564.000	130.304.470.000	129.738.730.000
Kab. Deli Serdang	394	271.906.373.000	306.386.948.000	312.277.329.000	312.546.966.000
Kab. Karo	269	173.021.882.000	197.078.926.000	201.208.286.000	198.409.273.000
Kab. Labuhan Batu	98	60.371.923.000	70.226.102.000	72.182.696.000	74.477.417.000
Kab. Labuhan Batu Selatan	73	46.205.735.000	61.548.371.000	65.076.224.000	67.788.110.000
Kab. Labuhan Batu Utara	90	68.036.521.000	79.123.527.000	83.576.158.000	86.022.841.000
Kab. Langkat	277	178.799.190.000	205.446.268.000	211.213.256.000	213.259.749.000
Kab. Mandailing Natal	407	252.910.057.000	285.841.420.000	290.920.103.000	286.845.864.000
Kab. Nias	170	148.261.931.000	180.585.127.000	181.381.215.000	179.544.025.000
Kab. Nias Utara	113	110.728.446.000	137.008.319.000	137.596.573.000	136.386.189.000
Kab. Nias Selatan	461	314.481.751.000	348.422.333.000	356.099.164.000	351.138.751.000
Kab. Nias Barat	105	92.269.401.000	114.000.248.000	118.531.988.000	117.397.253.000
Kab. Simalungun	413	259.232.136.000	294.442.204.000	298.689.733.000	296.800.840.000
Kab. Tapanuli Selatan	248	145.856.856.000	167.751.279.000	172.034.790.000	169.754.513.000
Kab. Tapanuli Tengah	215	121.058.197.000	140.541.973.000	144.349.335.000	142.631.022.000
Kab. Tapanuli Utara	252	164.129.846.000	184.186.164.000	194.621.304.000	192.016.817.000
Kab. Toba Samosir	244	154.311.189.000	176.101.238.000	179.571.269.000	177.074.852.000
Kab. Pakpak Bharat	52	40.948.983.000	48.298.630.000	50.424.120.000	50.970.983.000
Kab. Humbang Hasundutan	154	105.690.046.000	123.336.297.000	126.028.454.000	124.934.505.000
Kab. Serdang Bedagai	243	162.911.520.000	184.774.302.000	187.834.594.000	185.739.448.000
Kab. Samosir	134	90.921.937.000	108.744.499.000	109.313.044.000	107.929.748.000
Kab. Batu Bara	151	104.583.228.000	118.843.171.000	121.634.028.000	121.071.737.000
Kab. Padang Lawas	304	204.748.115.000	230.097.858.000	233.549.721.000	230.275.200.000

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2022 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pada tabel 8.1 di atas menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa setiap kabupaten di provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata di setiap kabupaten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, ini disebabkan oleh tujuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang bertujuan untuk kesejahteraan. Anggaran Dana Desa terbesar pada kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 351.138.751.000 dengan jumlah desa sebanyak 461 desa. Sedangkan anggaran yang terendah yaitu kota Padang Sidimpuaan sebesar Rp 41.800.048.000 dengan jumlah desa sebanyak 79 desa. Total dari anggaran Dana Desa 27 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,526 triliun. Disamping itu kabupaten Langkat dapat dikatakan kabupaten dengan anggaran dana desa yang sedang melihat jumlah desanya sebanyak 277 desa dengan anggaran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemandirian masyarakat dan lain sebagainya.

### 3. Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat

Berikut tabel 8.2 yang memperlihatkan data anggaran Dana Desa kabupaten Langkat tahun 2019-2021.

**Tabel 8.2**

Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat  
Tahun 2019 - 2022 (Milyar)

NO	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2018	183.816.256
2	2019	207.016.398
3	2020	212.446.839
4	2021	241.070.930

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2022 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Data pada tabel 8.2 di atas menunjukkan perkembangan Dana Desa Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 anggaran dana desa Kabupaten Langkat sebesar Rp 183.816.256 miliar. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 207.016.398 miliar naik dari tahun ke tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebesar Rp 212.446.839 miliar untuk dana desa angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 anggaran untuk dana desa kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 241.070.930 miliar. Jika dilihat anggaran dana desa Kabupaten Langkat setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat anggaran dana desa kabupaten Langkat setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang cukup luas di provinsi Sumatera Utara, serta dengan potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah, yakni perkebunan sawit, peternakan dan perikanan. Namun kekayaan alamnya hingga saat ini dinilai belum mampu (berkembang) dalam menyejahterakan sebagian penduduknya.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sesuai dengan Nawacita butir ketiga yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Maka kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

#### 4. Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat

Pada tabel 4.12 menunjukkan anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat tahun 2021.

**Tabel 8.3**  
**Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat**  
**Tahun 2021**

Nama Desa	Anggaran Dana Desa
Sei Tualang	Rp 772.734.000
Lubuk Kasih	Rp 809.261.000
Lubuk Kertang	Rp 839.891.000
Perlis	Rp 1.523.841.000
Kelantan	Rp 1.209.998.000
<b>Total</b>	<b>Rp 5.155.725.000</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabuapten Langkat ([www.dinaspmd.asahankab.go.id](http://www.dinaspmd.asahankab.go.id))

Berdasarkan tabel 8.3 di atas kecamatan Brandan Barat terdiri dari 5 desa. Pada anggaran Dana Desa

kecamatan Brandan Barat totalnya mencapai Rp 5.155.725.000. Desa Sei Tualang sebesar Rp 772.734.000. Desa Lubuk Kasih sebesar Rp 809.261.000, desa Lubuk Kertang Rp 839.891.000, desa Perlis Rp 1.523.841.000 dan desa Kelantan yaitu sebesar Rp 1.209.998.000. Desa dengan anggaran terbesar adalah Desa Perlis dengan jumlah mencapai 1 milyar lebih sedangkan desa dengan anggaran terendah adalah Desa Sei Tualang dengan jumlah 772 jutaan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Desa (IPD). Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

## **B. Analisis Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat**

IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya "Desa". Pengukuran IPD bersifat *village specific*, yang dibangun dari 2 (dua) sumber data yaitu: (1) data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2014 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun

indeks; serta (2) data wilayah administrasi pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah desa teregistrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, jumlah desa menurut Permendagri melebihi jumlah desa hasil Potensi Desa 2014 sebagai akibat terjadinya pemekaran desa setelah April 2014. Terhadap desa-desa hasil pemekaran wilayah tersebut maka IPDnya diestimasi berdasarkan nilai IPD desa induknya atau berdasarkan rata-rata IPD desa-desa lain yang secara spasial letaknya berdekatan dengan desa hasil pemekaran. Dalam merumuskan konsep dan metodologi pengukurannya, maka pengukuran IPD telah mempertimbangkan berbagai unsur kekhasan persoalan desa-desa di Indonesia.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Atas dasar amanat tersebut maka Desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. *Output* dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan

Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi, variabel, dan indikator penyusunnya.

Pengklasifikasian desa pernah dilakukan dengan klasifikasi: Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya. Hampir seluruh desa menyambut baik pengklasifikasian tersebut sebagai suatu upaya untuk mengetahui tingkat perkembangannya masing-masing desa. Klasifikasi desa dimunculkan kembali dalam RPJMN 2015–2019 terutama dikaitkan dengan sasaran pembangunan desa yang bertujuan untuk :

- 1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya;
- 2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan
- 3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa.

Penyusunan IPD ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjadikan IPD sebagai: (1) suatu alat/instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya; (2) suatu alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran/target RPJMN 2015–2019.

IPD disusun dengan “Desa” sebagai unit analisis, dan ditambah dengan berbagai informasi berupa rata-rata

indeks per pulau, rata-rata indeks per provinsi, dan rata-rata indeks per kabupaten/kota untuk memberikan potret terkait kondisi atau status perkembangan desa-desa per pulau, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan kata lain, IPD merupakan suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan atau pencapaian dimensi/aspek, variabel, dan indikator sebagai penjabaran dari dimensi/aspek perkembangan desa tersebut.

IPD diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. *Pertama*, IPD memuat data dan informasi penting yang dapat dijadikan sebagai acuan/referensi untuk melihat kondisi dan tingkat perkembangan desa di Indonesia pada posisi terkini. Data ini sangat membantu para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pengamat, peneliti, mahasiswa, bahkan masyarakat desa itu sendiri untuk memahami kondisi terkini kemajuan pembangunan desa di Indonesia. *Kedua*, IPD berguna sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan desa di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), tingkat provinsi (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), tingkat kabupaten/kota (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), serta tingkat desa (pemerintah desa dan masyarakat desa). IPD memuat data yang dapat menunjukkan dimensi, variabel, dan indikator mana saja yang perlu didukung untuk lebih ditingkatkan dan yang tidak perlu didukung karena dianggap sudah optimal/memadai di tingkat desa. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa dapat menjadikan IPD sebagai rujukan dalam proses perumusan kebijakan,

penyiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan desa. *Ketiga*, IPD berguna untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dalam pembangunan desa, kesesuaian antara program yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan desa, serta tercapai peningkatan status kemajuan desa tersebut.

Dalam pasal 74 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) kebutuhan dasar; (2) pelayanan dasar; (3) lingkungan; dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bagian penjelasan dalam Undang-undang tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan. Hasil sintesis tersebut membagi dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2014 yaitu sebagai berikut.

- 1) **Pelayanan Dasar**, mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan

akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.

- 2) **Kondisi Infrastruktur**, mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti : kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
- 3) **Aksesibilitas/Transportasi**, dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti : lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti :

waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2014, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat-pusat pemerintahan.

- 4) **Pelayanan Umum**, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (penyelenggaraan pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2014. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti : penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti : ketersediaan

lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

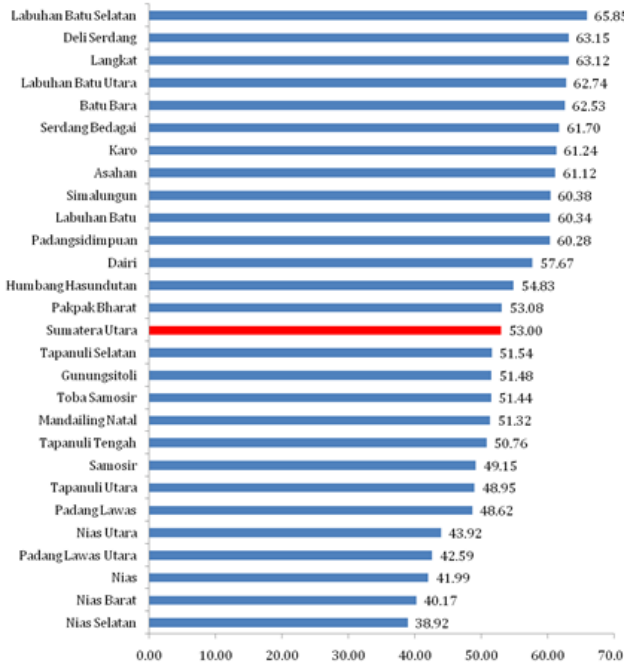
- 5) **Penyelenggaraan Pemerintahan**, mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti : kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti : kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Pada tahun 2014 rata-rata Indeks Pembangunan Desa di provinsi Sumatera Utara sebesar 53,00. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 55,69. Dari 5.389 desa, terdapat 3.299 desa dalam kategori berkembang (61,22%), sebanyak 88 desa mandiri (1,63%), dan sisanya sebanyak 2.002 desa (37,15%) dalam kategori desa tertinggal.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 38,15. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,34, dimensi pelayanan umum sebesar 46,01, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 49,97.

Gambar 8.3 menunjukkan Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Sumatra Utara tahun 2014. Rata-

rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan angka 65,85. Di kabupaten ini, dari 52 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru ada 2 desa, 50 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 38,92. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 390 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 53 unit.



Sumber : BPS Provinsi Sumatra Utara ([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

**Gambar 8.3** Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Pada gambar 4.12 memperlihatkan data Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Langkat tahun 2014. Dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2014 di kabupaten Langkat memiliki nilai IPD 63,12. Dengan nilai dimensi Pelayanan Dasar 67,96, Kondisi Infrastruktur 50,17, Aksesibilitas/Transportasi 74,30, Pelayanan Umum 53,59 dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 67,21.

**Tabel 8.4**  
Indeks Pembangunan Desa 2014  
Kabupaten Langkat

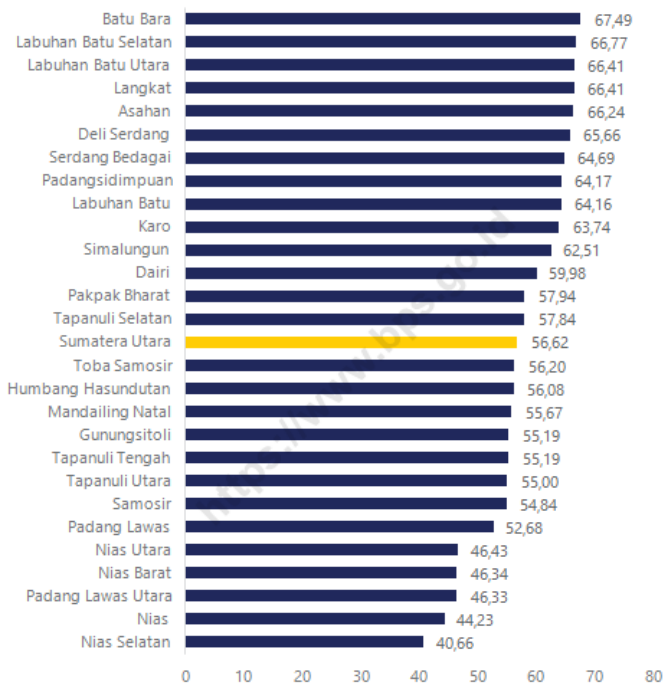
IPD Tahun 2014	63,12
Pelayanan Dasar	67,96
Kondisi Infrastruktur	50,17
Aksibilitas/Transportasi	74,30
Pelayanan Umum	53,59
Penyelenggaraan Pemerintahan	67,21
Persentase Klasifikasi Desa	
1. Tertinggal	4,17
2. Berkembang	93,75
3. Mandiri	2,08
Jumlah Desa	240

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2021 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

Kabupaten Langkat memiliki desa sebanyak 240 Desa. Dari 240 desa tersebut persentase Desa tertinggal sebanyak 4,17 desa, Desa Berkembang sebanyak 93,75 desa dan Desa Mandiri sebanyak 2,08 desa. Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 56,62.

Pada tahun 2018 nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa masing- masing dimensi, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai rata- rata indeks sebesar 41,71. Untuk Dimensi Pelayanan Dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, Dimensi Pelayanan Umum sebesar 49,76, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 62,43.

Berikut gambar 8.4 dibawah ini yang merupakan Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Sumatra Utara tahun 2018.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id))

**Gambar 4.13** Indeks Pembangunan Desa 2018 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Di kabupaten ini, dari 141 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru 12 desa, 129 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di provinsi Sumatera Utara terdapat di kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 369 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 80 desa.

Berikut tabel 8.5 yang menunjukkan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Langkat tahun 2018.

**Tabel 8.5**

Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 Kabupaten Langkat

Nama Kabupaten		Langkat
IPD Tahun 2018		66,41
Dimensi IPD	Pelayanan Dasar	68,12
	Kondisi Infrastruktur	55,19
	Akseibilitas/Transportasi	78,78
	Pelayanan Umum	55,21
	Penyelenggaraan Pemerintahan	75,34
Persentase Desa Menurut Status Desa	Tertinggal	0,83%
	Berkembang	92,08%
	Mandiri	7,08%
Jumlah Desa		240

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2021 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

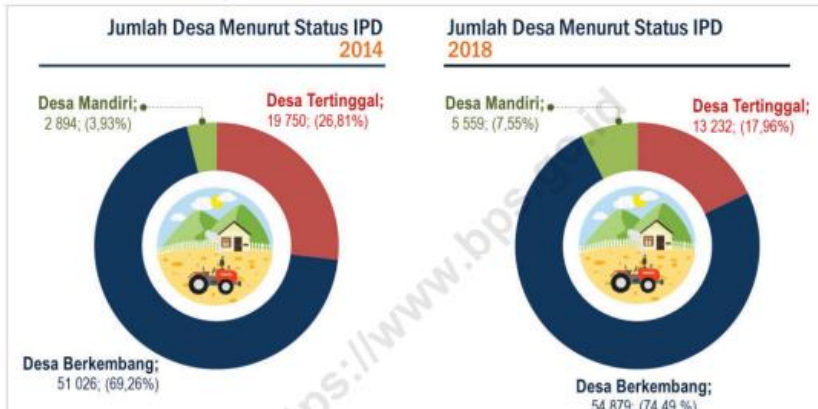
Tabel 8.5 menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2018 di kabupaten Langkat memiliki nilai IPD 66.41. Dengan nilai dimensi Pelayanan Dasar 68,12, Kondisi Infrastruktur 55,19, Aksesibilitas/Transportasi 78,78, Pelayanan Umum 55,21 dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 75,34.

Kabupaten Langkat memiliki desa sebanyak 240 Desa. Dari 240 desa tersebut persentasi Desa tertinggal sebanyak 0,83 persen, Desa Berkembang sebanyak 92,08 persen dan Desa Mandiri sebanyak 7,08 persen.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Desa di kabupaten Langkat pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2018 Perkembangan IPD meningkat 3,29 persen, nilai dimensi Pelayanan Dasar meningkat menjadi 0,16 persen, Kondisi Infrastruktur meningkat menjadi 5,02 persen, Aksesibilitas/Transportasi meningkat menjadi 4,48 persen, dan Pelayanan Umum meningkat menjadi 1,62 persen, Penyelenggaraan Pemerintahan meningkat menjadi 8,13 persen.

Sedangkan perkembangan desa dari tahun 2014 sampai 2018 juga meningkat. Persentase Desa Tertinggal menurun menjadi 3,34 persen, Desa Berkembang menurun menjadi 1,67 persen sedangkan Desa Mandiri meningkat menjadi 5,00 persen.

Berikut Gambar 8.5 yang menunjukkan jumlah Desa menurut status IPD 2014 dan 2018.



Sumber: BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2021 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 8.5** Jumlah Desa Menurut Status IPD Tahun 2014 dan 2018

Berdasarkan gambar 4.14 menunjukkan bahwa publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.423 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018.

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan antara tahun 2014 dan 2018 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang

mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2018.

Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realistik pembangunan desa yang sesungguhnya dengan memperkirakan seberapa besa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa serta skala kriteria yang bertambah yaitu desa sangat tertinggal daan desa maju.

Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Langkat pertumbuhan ekonomi di kabuapaten Langkat juga dipengaruhi oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Kabupaten Langkat termasuk kabupaten dengan anggaran dana desa terbesar diantara kabupaten lainnya.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa yang berdampingan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) maka melimpahnya sumberdaya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan desa di kabupaten Langkat juga akan meningkat.

### C. Analisis Ekonomi dan Sosial dari Capaian Indeks Desa Membangun untuk Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat

Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan

kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini strata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Berikut ini tabel 8.6 yang menunjukkan nilai Indeks Desa Membangun kabupaten Langkat tahun 2019-2022.

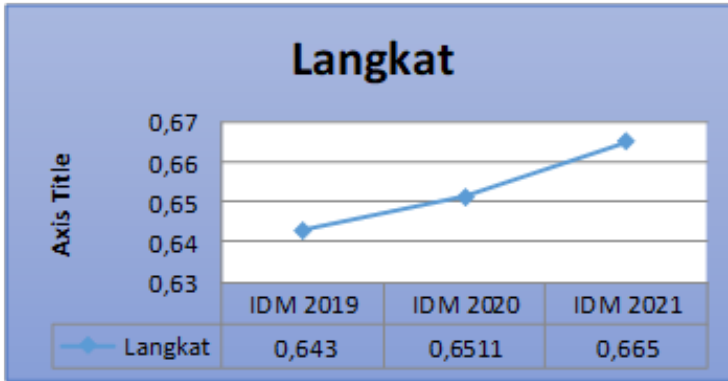
**Tabel 8.6.**

Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat Tahun 2019 dan 2021

Kabupaten/ Kecamatan	Average of Nilai IDM 2019	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2020	Status Kecamatan
LANGKAT	0.6430	BERKEMBANG	0.6511	BERKEMBANG
BAHOROK	0.7053	BERKEMBANG	0.7202	MAJU
SAWIT SEBERANG	0.6814	BERKEMBANG	0.6649	BERKEMBANG
BABALAN	0.6744	BERKEMBANG	0.6545	BERKEMBANG
PANGKALAN SUSU	0.6640	BERKEMBANG	0.6735	BERKEMBANG
STABAT	0.6639	BERKEMBANG	0.6775	BERKEMBANG
SECANGGANG	0.6617	BERKEMBANG	0.6623	BERKEMBANG

SEI BINGEI	0.6617	BERKEMBANG	0.6725	BERKEMBANG
BINJAI	0.6604	BERKEMBANG	0.6481	BERKEMBANG
SIRAPIT	0.6597	BERKEMBANG	0.6637	BERKEMBANG
WAMPU	0.6485	BERKEMBANG	0.6568	BERKEMBANG
SEI LEPAN	0.6469	BERKEMBANG	0.6284	BERKEMBANG
SALAPIAN	0.6432	BERKEMBANG	0.6642	BERKEMBANG
HINAI	0.6427	BERKEMBANG	0.6479	BERKEMBANG
GEBANG	0.6424	BERKEMBANG	0.6420	BERKEMBANG
SELESAI	0.6392	BERKEMBANG	0.6533	BERKEMBANG
TANJUNG PURA	0.6128	BERKEMBANG	0.6281	BERKEMBANG
BESITANG	0.6358	BERKEMBANG	0.6404	BERKEMBANG
PADANG TUALANG	0.6248	BERKEMBANG	0.6351	BERKEMBANG
KUALA	0.6120	BERKEMBANG	0.6191	BERKEMBANG
KUTAMBARU	0.5977	TERTINGGAL	0.6021	BERKEMBANG
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL	0.6030	BERKEMBANG
PEMATANG JAYA	0.5866	TERTINGGAL	0.6006	BERKEMBANG
BATANG SERANGAN	0.5865	TERTINGGAL	0.6290	BERKEMBANG
<b>Kabupaten/Kecamatan</b>	<b>Average of Nilai IDM 2021</b>	<b>Status Kecamatan</b>	<b>Average of Nilai IDM 2022</b>	<b>Status Kecamatan</b>
LANGKAT	0.6650	BERKEMBANG	0.6710	BERKEMBANG
BAHOROK	0.7215	MAJU	0.7464	MAJU
SAWIT SEBERANG	0.6598	BERKEMBANG	0.6679	BERKEMBANG
BABALAN	0.6654	BERKEMBANG	0.6884	BERKEMBANG
PANGKALAN SUSU	0.6682	BERKEMBANG	0.6672	BERKEMBANG
STABAT	0.6757	BERKEMBANG	0.6927	BERKEMBANG
SECANGGANG	0.6442	BERKEMBANG	0.6500	BERKEMBANG
SEI BINGEI	0.6677	BERKEMBANG	0.6776	BERKEMBANG
BINJAI	0.6500	BERKEMBANG	0.6710	BERKEMBANG
SIRAPIT	0.6799	BERKEMBANG	0.7071	BERKEMBANG
WAMPU	0.6655	BERKEMBANG	0.6838	BERKEMBANG
SEI LEPAN	0.6402	BERKEMBANG	0.6525	BERKEMBANG
SALAPIAN	0.6639	BERKEMBANG	0.6777	BERKEMBANG
HINAI	0.6652	BERKEMBANG	0.6687	BERKEMBANG
GEBANG	0.6500	BERKEMBANG	0.6577	BERKEMBANG
SELESAI	0.6662	BERKEMBANG	0.6999	BERKEMBANG
TANJUNG PURA	0.6298	BERKEMBANG	0.6463	BERKEMBANG
BESITANG	0.6441	BERKEMBANG	0.6708	BERKEMBANG
PADANG TUALANG	0.6463	BERKEMBANG	0.6499	BERKEMBANG
KUALA	0.6216	BERKEMBANG	0.6469	BERKEMBANG
KUTAMBARU	0.6111	TERTINGGAL	0.6340	BERKEMBANG
BERANDAN BARAT	0.6124	TERTINGGAL	0.6306	BERKEMBANG
PEMATANG JAYA	0.6134	TERTINGGAL	0.6408	BERKEMBANG
BATANG SERANGAN	0.6373	TERTINGGAL	0.6532	BERKEMBANG

Sumber :BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 8.6.** Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2021

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan, dan 240 Desa. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di kabupaten Langkat sangatlah pesat, dapat kita lihat dari tabel 24 bahwasanya ada 1 kecamatan yang status atau kategori desanya maju yaitu desa Bahorok sedangkan 22 desa lainnya termasuk dalam status atau kategori berkembang.

Gambar 4.15 menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun (IPD) di kabupaten Langkat setiap tahunnya meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,6430, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0081) persen menjadi 0,6511, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0139) persen menjadi 0,6650 dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0061) persen menjadi 0,6711. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 status atau kategori Indeks Desa Membangun di kabupaten Langkat adalah berkembang.

Berikut ini tabel 4.16 yang merupakan nilai Indeks

Desa Membangun di kecamatan Brandan Barat tahun 2019-2022.

**Tabel 8.7**

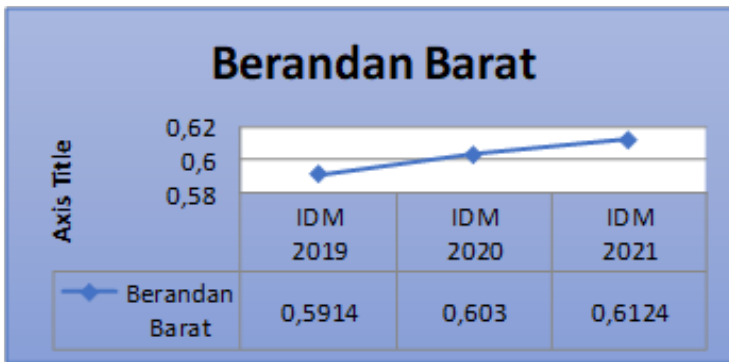
Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat Tahun 2019 – 2022

Kabupaten/ Kecamatan	Average of Nilai IDM 2019	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2020	Status Kecamatan
<b>BERANDAN BARAT</b>	0.5914	TERTINGGAL	0.6030	BERKEMBANG
LUBUK KASIH	0.6316	BERKEMBANG	0.6759	BERKEMBANG
PERLIS	0.5852	TERTINGGAL	0.5219	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.5584	TERTINGGAL	0.6632	BERKEMBANG
KELANTAN	0.5412	TERTINGGAL	0.5359	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.5284	TERTINGGAL	0.6181	BERKEMBANG
Kabupaten/Kecamatan	Average of Nilai IDM 2021	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2022	Status Kecamatan
<b>BERANDAN BARAT</b>	0.6124	BERKEMBANG	0.6306	BERKEMBANG
LUBUK KASIH	0.6835	MAJU	0.7094	BERKEMBANG
PERLIS	0.5441	TERTINGGAL	0.5491	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.6689	BERKEMBANG	0.6670	BERKEMBANG
KELANTAN	0.5397	TERTINGGAL	0.5397	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.6257	BERKEMBANG	0.6930	BERKEMBANG

Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

Kecamatan Berandan Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Langkat, kecamatan ini memiliki 5 Desa dan 2 Kelurahan. Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Berandan Barat cukup baik. Dari 5 desa yang ada terdapat 2 Desa yang masuk dalam status tertinggal sedangkan 3 desa lainnya masuk dalam status berkembang. Pada tahun 2021 salah satu desa di Kecamatan Berandan Barat pernah memasuki status desa maju yaitu desa Lubuk Kasih,

kemudian pada tahun 2022 desa tersebut kembali menjadi status berkembang.



Sumber : BPS Kabupaten Langkat, 2022 ([www.langkat.bps.go.id](http://www.langkat.bps.go.id))

**Gambar 8.7.** Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat Tahun 2019 – 2021

Gambar 8.7 menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun di Kecamatan Berandan Barat meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0.5914, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0116) persen menjadi 0,6030, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun naik (0,0094) persen menjadi 0,6030, dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun naik menjadi (0,0182) persen menjadi 0,6306. Pada tahun 2019 Kecamatan Berandan Barat berada di status Desa Tertinggal kemudian pada tahun 2020-2022 status Berandan Barat berubah menjadi Desa Berkembang.

Berikut ini merupakan anggaran Dana Desa di Kecamatan Brandan Barat tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 8.8.**

Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat Tahun 2021

Nama Desa	Anggaran Dana Desa, 2021
Sei Tualang	Rp 772.734.000
Lubuk Kasih	Rp 809.261.000
Lubuk Kertang	Rp 839.891.000
Perlis	Rp 1.523.841.000
Kelantan	Rp 1.209.998.000
Total	Rp 5.155.725.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabupaten Langkat ([www.dinaspmd.asahankab.go.id](http://www.dinaspmd.asahankab.go.id))

Berdasarkan tabel 8.8, Kecamatan Brandan Barat terdiri dari 5 desa. Pada anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat totalnya mencapai Rp 5.155.725.000. Desa Sei Tualang sebesar Rp 772.734.000. Desa Lubuk Kasih sebesar Rp 809.261.000, desa Lubuk Kertang Rp 839.891.000, desa Perlis Rp 1.523.841.000 dan desa Kelantan yaitu sebesar Rp 1.209.998.000. Desa dengan anggaran terbesar adalah desa Perlis dengan jumlah mencapai 1 milyar lebih sedangkan desa dengan anggaran terendah adalah Desa Sei Tualang dengan jumlah 772 jutaan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat

nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa yang berdampingan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) maka melimpahnya sumberdaya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan desa di kecamatan Brandan Barat juga akan meningkat.

#### **D. Analisis Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Langkat Pasca Kebijakan Dana Desa.**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan permodelan analisis regresi liner berganda dalam hal ini dilakukan karena peneliti akan berusaha menjelaskan hubungan antara dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa

membangun (IDM). Dengan menggunakan data *timeseries* selama periode 2014-2021. Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12*. Berikut tabel 4.18 hasil *running* data yang telah diolah.

**Tabel 8.9.**

Hasil Regresi Model Indeks Desa Membangun (IDM)

Dependent Variable: IDM

Method: Least Squares

Date: 08/28/22 Time: 20:46

Sample: 1 8

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.360090	1.866838	0.192888	0.8594
DD	1.48E-09	1.29E-09	1.153470	0.3323
ADD	8.62E-10	1.47E-09	0.584819	0.5997
DAK	-1.24E-10	4.90E-10	-0.253368	0.8164
IPM	-1.57E-07	2.28E-06	-0.068900	0.9494
R-squared	0.925333	Mean dependent var		0.590975
Adjusted R-squared	0.825777	S.D. dependent var		0.060573
S.E. of regression	0.025283	Akaike info criterion		-4.248179
Sum squared resid	0.001918	Schwarz criterion		-4.198528
Log likelihood	21.99272	Hannan-Quinn criter.		-4.583055
F-statistic	9.294621	Durbin-Watson stat		2.114131
Prob(F-statistic)	0.048722			

Sumber : Eviews 12, diolah, 2022.

Dari hasil regresi pertama di atas, menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu indeks desa membangun (IDM). Karena nilai dari 4 variabel bebas tersebut memiliki nilai prob/signifikan yang lebih besar dari pada 0,05 ( $\alpha > 5\%$ ). Namun regresi tersebut menghasilkan *Adjusted R-squared* yang tinggi yaitu sebesar 0,82 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variabel terikat sangat tinggi dan tidak terjadi autokorelasi. Maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

## 1. Penaksiran

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi (*R Square*) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi yaitu variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,925333, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas/independent yaitu dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 92,5333% terhadap indeks desa membangun (IDM) (variabel terikat/dependen). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,4667% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

## 2. Interpretasi Hasil

Dari hasil regres pada model variabel Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 ADD_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 IPM_t + \epsilon_t$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$$\text{IDM}_t = 0,360090 + 1,480009 \text{ DD}_t + 8,620010 \text{ ADD}_t + 1,240010 \text{ DAK}_t + -1,570007 \text{ IPM}_t + \epsilon_t$$

Koefisien  $\beta_0$  memiliki nilai positif sebesar 0.360090, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai indeks desa membangun sebesar 0,360090.

Koefisien  $\beta_1 = 1,480009$ , artinya jika nilai dana desa (DD) mengalami kenaikan 1% maka indeks desa membangun di kabupaten Langkat juga akan mengalami peningkatan sebesar 1,480009%. Jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai *probability* 0,3323 ( $>0,1$ ) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai dana desa (DD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien  $\beta_2 = 8,620010$ , artinya jika nilai alokasi dana desa (ADD) mengalami kenaikan 1% maka indeks desa membangun di kabupaten Langkat juga akan meningkat sebesar 8,620010% dan jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai *probability* 0,5997 ( $> 0,1$ ) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien  $\beta_3 = -1,240010$ , artinya jika nilai dana alokasi khusus (DAK) mengalami kenaikan 1% maka ind

eks desa membangun di kabupaten Langkat juga akan mengalami penurunan sebesar 1,240010% dan jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai *probability* 0,8164 ( $> 0,1$ ) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien  $\beta_4 = 1,570007$ , artinya jika nilai indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 1% maka indeks desa membangun di kabupaten Langkat mengalami penurunan sebesar 1,570007% dan jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai *probability* 0,9494 ( $> 0,1$ ) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

### 3. Konstanta dan Intersep

Dalam hasil estimasi data pada model regresi linier berganda, terdapat nilai konstanta sebesar 0,360090, yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat nilai rata-rata indeks desa membangun di Kabupaten Langkat cenderung meningkat ketika variabel penjelas berubah. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Dana Desa (DD)**

Hasil ini menyatakan bahwa dana desa tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalah utama dana desa di Kabupaten Langkat adalah pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintah desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap. Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

### **2) Alokasi Dana Desa (ADD)**

Hasil ini menyatakan bahwa aloaksi dana desa tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalah utama alokasi dana desa di Kabuaptan Langkat adalah kesulitan dalam membuat laporan dan adanya tantangan yang bersifat umum dan teknis. Perlunya pendirian BUMD dan penguatan lembaga desa serta pemerataan dan keseimbangan antara pembangunan infrastuktur dan manusia.

### **3) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Hasil ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di kabupaten Langkat. Masalah utama dana alokasi khusus di Kabupaten Langkat adalah memperlihatkan bahwa DAK dengan pola dan besaran alokasi seperti yang diterapkan selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

### **4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di kabupaten Langkat. Masalahnya yaitu ketidakmerataan capaian IPM di Provinsi membuat ketimpangan pendapatan di Indonesia sampai Kabupaten, untuk membangun indeks pembangunan manusia peningkatan angka harapan hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah membutuhkan upaya yang konsisten dan sinergi agar mencapai tujuan yang maksimal.

## 4. Uji Statistik

### 1) Uji-F

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *autoregressive* variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun (IDM), memiliki nilai *probability* (F *statistic*) sebesar 0,048722 dan nilai F *statistic* sebesar 9,294621.

Dalam uji-F ini menggunakan Probabilitas atau F-Statistik atau p-value, dimana membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi atau  $\alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ). Pengambilan keputusan p-value adalah sebagai berikut :

1. Jika p-value  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak.
2. Jika p-value  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Dengan nilai p-value  $< \alpha$  yaitu  $0,048722 < 0,05$ , dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen yaitu dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Indeks Desa Membangun/IDM).

## 2) Uji -t

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variabel-variabel dependen. Regresi pengaruh variabel-variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun (IDM). Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai  $t_{\text{tabel}}$  dengan cara  $df (n) - k = 8 - 4 = 4$  dengan ( $\alpha = 10\%$ ) maka nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,132.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh dana desa (DD) terhadap IDM diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 1,153470 sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,132 dan mempunyai angka dimana signifikan sebesar 0,3323 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara dana desa terhadap IDM di kabupaten Langkat.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap IDM diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 0,584819 sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,132 dan mempunyai angka dimana signifikan sebesar 0,5997 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara alokasi dana desa terhadap IDM di kabupaten Langkat.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IDM diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar -0,253368 sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,132 dan mempunyai angka dimana signifikan sebesar 0,8164 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak adanya

pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap IDM di kabupaten Langkat.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap IDM diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,068900$  sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar  $2,132$  dan mempunyai angka dimana signifikan sebesar  $0,9494 > 0,05$ , hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap indeks Desa Membangun (IDM) di kabupaten Langkat.

## 5. Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibentuk terjadi korelasi Antara variabel dalam model tersebut. Jika terjadi multikolinearitas maka variabel-variabel tidak ortogonal atau nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk melihat adanya tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.18 dimana uji multikolinearitas menunjukkan *Centered* VIF terdapat 2 variabel yang memiliki nilai lebih besar dari 10 ( $VIF > 10$ ) yaitu ADD dan DAK, maka artinya bahwa dalam hasil regresi logaritma tersebut terjadi multikolinieritas. Dan 2 variabel lainnya memiliki nilai lebih kecil dari 10 ( $VIF < 10$ ) yaitu DD dan IPM, maka artinya bahwa dalam hasil regresi logaritma tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas untuk melihat ada atau tidak

adanya kesamaan antar variabel dari eror setiap variabel bebas.

**Tabel 8.10.**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 08/29/22 Time: 15:23  
Sample: 1 8  
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.485085	43615.18	NA
DD	1.66E-18	806.6974	9.436645
ADD	2.17E-18	373.1488	67.22667
DAK	2.40E-19	325.5889	43.25831
IPM	5.18E-12	34045.65	6.575444

Sumber : Eviews 12 diolah

## 2) Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8.11.**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	12.01685	Prob. F(4,3)	0.0343
Obs*R-squared	7.530033	Prob. Chi-Square(4)	0.1104
Scaled explained SS	0.111632	Prob. Chi-Square(4)	0.9985

Test Equation:  
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares  
Date: 08/29/22 Time: 15:23  
Sample: 1 8  
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007868	0.003217	2.446060	0.0920
DD	-3.52E-12	2.22E-12	-1.588533	0.2104
ADD	4.54E-12	2.54E-12	1.789060	0.1716
DAK	-2.28E-12	8.45E-13	-2.695642	0.0741
IPM	-9.28E-09	3.92E-09	-2.365475	0.0989

R-squared	0.941254	Mean dependent var	0.000240
Adjusted R-squared	0.862926	S.D. dependent var	0.000118
S.E. of regression	4.36E-05	Akaike info criterion	-16.97541
Sum squared resid	5.69E-09	Schwarz criterion	-16.92575
Log likelihood	72.90162	Hannan-Quinn criter.	-17.31028
F-statistic	12.01685	Durbin-Watson stat	2.755482
Prob(F-statistic)	0.034342		

Sumber : Eviews 12, diolah, 2022.

Heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua variabel yang diambil keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier ialah dengan melihat nilai pada test white, dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability observasion R-squared* > 5%, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Dari hasil olahan data dapat dilihat pada tabel 4.20.

### 3) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *durbin watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

**Tabel 8.12**  
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	0.512212	Prob. F(2,1)	0.7028	
Obs*R-squared	4.048258	Prob. Chi-Square(2)	0.1321	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/29/22 Time: 15:24				
Sample: 1 8				
Included observations: 8				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.873370	2.692335	0.324391	0.8003
DD	7.13E-11	1.81E-09	0.039402	0.9749
ADD	1.36E-09	2.76E-09	0.492079	0.7089
DAK	-4.94E-10	9.38E-10	-0.526235	0.6916
IPM	-1.21E-06	3.31E-06	-0.366027	0.7766
RESID(-1)	-1.413096	1.606564	-0.879576	0.5407
RESID(-2)	-0.871681	1.111389	-0.784316	0.5766
R-squared	0.506032	Mean dependent var	-1.02E-16	
Adjusted R-squared	-2.457774	S.D. dependent var	0.016552	
S.E. of regression	0.030778	Akaike info criterion	-4.453464	
Sum squared resid	0.000947	Schwarz criterion	-4.383953	
Log likelihood	24.81386	Hannan-Quinn criter.	-4.922290	
F-statistic	0.170737	Durbin-Watson stat	2.652213	
Prob(F-statistic)	0.948145			

Sumber : Eviews 12, diolah, 2022.

Pada model pertama setelah dilakukan pengujian diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.652213, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Berdasarkan pengujian dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test* tersebut bahwa model regresi linier berganda antara indeks desa membangun (IDM), terhadap dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terjadi autokorelasi.

#### **E. Analisis dan Evaluasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Kelantan dan Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat**

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 2 (dua) desa dari 5 (lima) desa yang ada di kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Desa tersebut ialah desa Kelantan dan desa Perlis. Alasan pemilihan sampel 2 (desa) tersebut karena letak desanya saling berdekatan, termasuk desa tertinggal yang tingkat aktivitas ekonomi masih rendah, serta kategori penerima Dana Desa terbesar diantara desa yang lain di kecamatan Brandan Barat.

Dalam hal ini untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan maka dilakukan riset menggunakan wawancara dan penyebaran beberapa kuisioner kepada Pemerintah Desa.

Dana desa yang dikelola di Desa kecamatan Brandan Barat adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Langkat yang digunakan untuk membiayai pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam 3 tahap, yaitu : Tahap I (40%) bulan Januari; Tahap II (40%) bulan Maret ; Tahap III (20%) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap yaitu Tahap I (60%) bulan Januari ; dan Tahap II (40%) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp 46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp 1,37 triliun (1.741 desa). Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Dana Desa juga disalurkan untuk :

- a. Penanganan COVID-19
- b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
  - 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes
  - 2) Penyediaan listrik desa
  - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
  - 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  - 2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa
  - 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa
  - 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa
  - 1) Desa Aman Covid-19
  - 2) BLT-DD

Adapun penggunaan Dana Desa di dua desa kecamatan Brandan Barat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat,

bidang pemberdayaan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD) dan telah sesuai dengan Permendes No.4 tahun 2017. Penggunaan Dana Desa tersebut juga telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa di ruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa tahun 2022 di depan kantor Desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dua desa tersebut maka dengan rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk setiap bidang sebagai berikut :

**Tabel 8.13.**

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kelantan Tahun Anggaran 2022**

<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 0</b>
2.	Dana Desa	Rp 1.116.592.000
3.	Anggaran Dana Desa	Rp 406.683.000
4.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp 11.800.000
5.	<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>Rp 20.120.630</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 1.555.195.630</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 406.683.000 (26%)
2.	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan	Rp 274.804.900 (18%)
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 189.800.000 (12%)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 144.580.000 (10%)
5.	Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa (BLT-DD)	Rp 539.327.360 (34%)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.384.375.260</b>

Sumber : Pemerintah Desa Klantan, 2022.

Pada tabel 8.13 dapat diketahui bahwa total belanja desa yang diterima oleh desa Kelantan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.384.375.260 yang penggunaannya

dialokasikan ke lima bidang di antaranya: bidang penyelenggara pemerintah dialokasikan dana sebesar Rp.506.683.000, untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp.274.804.900, untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.189.800.000 untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp.144.580.370, dan terakhir untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD) sebesar Rp.539.327.360. Khusus di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa (BLT-DD) mendapat porsi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp.539.327.360 atau 34% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

**Tabel 8.14.**

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa  
Perlis Tahun Anggaran 2022**

<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp 7.000.000,00
2.	Dana Desa	Rp 863.174.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak	Rp 61.683.000,00
4.	Alokasi Dana Desa	Rp 1.237.261.000,00
5.	Bursa Kerja Khusus Provinsi	Rp 138.000.000,00
6.	Bursa Kerja Kabupaten	Rp 165.000.000,00
7.	Pendapatan Lain-lain	Rp 30.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 2.502.118.000,00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	
1.	Bidang Pemerintahan Desa	Rp 1.392.170.919,60 (53%)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 264.765.839,78 (10%)
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 499.428.500,00 (19%)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 41.855.000,00 (2%)
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak desa	Rp 414.702.800,00 (16%)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 2.612.931.495,38</b>

Sumber : Pemerintah Desa Perlis, 2022.

Total belanja desa diterima oleh desa Perlis untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp2.612.931.495,38 yang penggunaannya dialokasikan ke 5 bidang diantaranya : Bidang penyelenggara pemerintah dialokasikan dana sebesar Rp.1.392.170.919,60, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp264.765.839,78, untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp499.428.500,00 untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp.41.855.000,00, dan terakhir untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp.414.702.800,00. Khusus di bidang pemerintahan desa mendapat porsi Dana Desa yang lebih besar yaitu Rp.1.392.170.919,60 atau 53% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola.

Dari kedua desa tersebut penggunaan Dana Desa berfokus pada anggaran pemerintahan desa yang digunakan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bidang penyelenggaraan pemerintah, serta bidang penyelenggaraan pembangunan desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Kelantan kabupaten Langkat merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan pengawasan pembangunan serta pelaporan hasil pembangunan.

Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan desa Kelantan dengan

perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan fisik desa Kelantan saat ini berfokus pada lanjutan jalan jerambah dusun III, depan kantor 155 M x 1,3 M dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp229.004.900. Namun nyatanya proyek jalan jerambah di desa Kelantan di duga asal jadi. Karena jika dilihat secara langsung kondisi lanjutan jalan jerambah desa kelantan yang diduga dikerjakan oknum perangkat desa karena hampir seluruh tiang penahan pengerjaan jalan tersebut tidak berganti dan masih menggunakan yang lama. Oleh karena untuk kondisi infrastruktur desa Kelantan masih sangat rendah.



## BAB 9

# PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Pengembangan dan peningkatan Dana Desa di kabupaten Langkat dilakukan untuk pengembangan potensi desa seperti pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di kabupaten Langkat pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2018 Perkembangan IPD meningkat 3,29 persen, nilai dimensi Pelayanan Dasar meningkat menjadi 0,16 persen, Kondisi Infrastruktur meningkat menjadi 5,02 persen, Aksesibilitas/Transportasi meningkat menjadi 4,48 persen, dan Pelayanan Umum meningkat menjadi 1,62 persen, Penyelenggaraan Pemerintahan meningkat menjadi 8,13 persen.
3. Capaian sosial dan ekonomi dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2019 di kabupaten Langkat masuk kedalam kategori status kabupaten berkembang sedangkan di tingkat kecamatan khususnya kecamatan Brandan Barat masuk kedalam kategori status desa tertinggal

serta kesejahteraan masyarakat masih rendah. Indeks Desa Membangun di kecamatan Berandan Barat meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,5914, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0116) persen menjadi 0,6030, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun naik (0,0094) persen menjadi 0,6030, dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun naik menjadi (0,0182) persen menjadi 0,6306. Pada tahun 2019 Kecamatan Berandan Barat berada di status Desa Tertinggal kemudian pada tahun 2020-2022 status Berandan Barat berubah menjadi Desa Berkembang.

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dan regresi ini menghasilkan Adjusted R-Squared yang tinggi yaitu sebesar 0,86 persen dan Prob (F-Statistic) sebesar 0,08 persen, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi dan tidak terjadi autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,352309.
5. Dana Desa yang dikelola di Desa Kelantan dan Perlis adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran dan Belanja Negara) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat. pengelolaan dana desa di Kecamatan Brandan Barat Kabupten Langkat sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan

APBDes 2022 Pembangunan desa yang dilakukan dari dana desa lebih difokuskan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa (BLT-DD), bidang penyelenggaraan pembangunan serta bidang penyelenggaraan pemerintahan.



## GLOSARIUM

Ekonomi	Disiplin ilmu yang mempelajari teknik manusia dalam mencapai kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Perekonomian	Seri besar aktivitas pembuatan dan pemakaian yang saling terhubung yang membantu menentukan cara pengalokasian sumber daya yang terbatas.
Teori	Sebuah rangkaian unsur atau faktor, definisi dan bukti yang saling terkait yang membentuk sebuah pemahaman terstruktur mengenai fenomena dengan mengidentifikasi hubungan antar unsur, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.
Pembangunan Ekonomi	Suatu proses peningkatan pendapatan keseluruhan dan pendapatan per orang dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan didampingi oleh perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara serta

Analisis	<p>distribusi pendapatan yang merata bagi penduduknya.</p> <p>Mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.</p>
Operasional	<p>Konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variable.</p>
Demografis	<p>Penelitian terhadap populasi masyarakat berdasarkan beragam faktor</p>

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7, halaman 1-34.*
- Andri Yanto. (2003), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional, Jakarta : Erlangga.
- Azwardi dan Abukosim. (2007), Pengelolaan Keuangan Pedesaan dalam mendorong Pembangunan wilayah Pedesaan : Suatu Tinjauan Teoritis, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, , Volume 5, No.2, Desember 2007, hal: 127-134.*
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2021. Jakarta : BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara Tahun 2011-2021. Sumut : BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat Tahun 2010-2021. Langkat : BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistka (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau 2018. Katalog 11051123 : BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistka (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau 2018. Katalog 11051123: BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistka (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Sumatera 2018. Katalog 11051123: BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistka (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Desa Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa

- di Indonesia 2018. Katalog 11051123: BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Indeks Pembangunan Desa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumut 2018. Katalog 11051123: BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Coniq Putri Andinata, dkk. (2018), Analisis Pendapatan Nasional di Negara-negara Anggota ASEAN), Jurnal Ekuilibrium Volume 2 No.1 (2018).
- Databoks. (2022), Ekonomi Sumatera Utara Tumbuh 2,61% pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/17/ekonomi-sumatera-utara-tumbuh-261-pada-2021>
- Firdaus. (2012), Analisis Pendapatan, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Nasional, Jurnal Plano Madani Vol. I Nomor 1/2012.
- Gujarati, D. (2013). Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga.
- Hermawan, Dudi. (2007). “Analisis Pelaksana Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Study Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)”, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa. (<https://idm.kemendes.go.id>)
- Indeks Pembangunan Desa (IPD). (<https://www.bps.go.id>)
- Jhingan. (2014). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan, M. (2010). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemendesa. (2019). Data Perkembangan Pembangunan Desa Menurut status IDM. <https://idm.kemendesa.go.id>.

- Kemendesdesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi*.  
<https://idm.kemendesdesa.go.id>.
- Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi*.
- Kemendesdesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi*.  
<https://idm.kemendesdesa.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Dana Desa per Pulau di Indonesia tahun 2017*.  
<http://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Sebaran Dana Desa*.
- Kontan.co.id. (2023). *Angka Kemiskinan Bisa Ditekan pada 2023 Jika Sejumlah Syarat Ini Terpenuhi*,  
<https://nasional.kontan.co.id/news/angka-kemiskinan-bisa-ditekan-pada-2023-jika-sejumlah-syarat-ini-terpenuhi#:~:text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,%2C5%25di%20tahun%202023>.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. ( 2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3. Jakarta : Erlangga.
- Manik, Rikwan & Hidayat Paidi. (2010). *Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Volume 2 No. 1 Maret 2010.
- MP. Todaro. (2011), *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.

- Riyadi, M.M.D. (2000). Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Paper disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah.
- Rochjadi, Achmad. Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2006.
- Sadono Sukirno. (2006), Ekonomi Pembangunan Proses , Masalah dan Dasar Kebijakan, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Sri Endang Rahayu, dkk. (2020), Perekonomian Indonesia, Medan : Perdana Publishing.
- Suliswanto. (2010), Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8 No.2 (2010).
- Suroso. (2020), Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal, Jurnal Litbang, Volume 16 No.1 (2020).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga
- Wildani Khotami. (2019), Ekonomi Pembangunan, Banjarmasin : Akademi Maritim Nusantara.
- Yanhar Jamaluddin, dkk (2018), Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, 6 (1) (2018): 14-24

## TENTANG PENULIS

**Sri Endang Rahayu., S.E., M.Si.**

Sri Endang Rahayu dilahirkan di Tebing Tinggi, tanggal 28 Oktober 1979. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Saimin dan Ibu Hj. Sri Erlina. Penulis menempuh pendidikan Sarjana S1 pada tahun 1998 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara program Studi



Ekonomi Pembangunan tamat tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada tahun 2003 di program pasca sarjana Unsyiah di Banda Aceh program studi Ekonomi Pembangunan dan tamat tahun 2005.

Penulis mulai mengajar pada tahun 2002 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Adapun mata kuliah yang penulis ampuh adalah Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonomi Makro Lanjutan, Ekonomi Bisnis Internasional, Ekonomi Internasional, Keuangan Internasional dan Perekonomian Indonesia.

Di antara tulisan dalam bentuk buku ajar dan artikel ilmiah yang sudah penulis terbitkan di berbagai jurnal terakreditasi dan jurnal internasional. Adapun buku ajar yang pernah di tulis antara lain adalah buku Ekonomi Mikro, buku Ekonomi Makro, Buku Ekonomi Internasional, buku Ekonomi Bisnis Internasional dan terakhir buku Perekonomian Indonesia.

Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, almarhum ayahanda **H. Saimin** dan almarhumma ibunda **H. Sri Erlina**, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan memberikan doa terbaik. Kepada suami tercinta, **Andi Suwondo, A.Md**, terima kasih karena selalu mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Dan untuk kedua anakku tersayang, **Az Zahra Rizky dan Ariqa Fatina** yang telah memberikan semangat dan dengan senyum manisnya yang selalu menambah semangat penulis untuk menghasilkan karya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan membutuhkan masukan dari semua pihak, guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

## TENTANG EDITOR

### **Nel Arianty., SE., M.M.**

Nel Arianty adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan mengajar pada Prodi Manajemen. Adapun mata kuliah yang diampu adalah : Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi. Dilahirkan di Medan 26 Januari 1977,



menamatkan Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 1999, Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Sumatera Utara dan tamat pada tahun 2001. Selain mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga ada mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta lainnya di Kota Medan.



## INDEKS

- A**
- ADD, 44, 114, 116, 122,  
186, 187, 188, 189, 190,  
191, 193, 194, 195, 198,  
207
- Alokasi, vi, 16, 40, 44, 87,  
101, 114, 115, 121, 152,  
153, 154, 157, 191, 195,  
201, 202
- Anggaran, vi, 15, 18, 19,  
21, 26, 42, 87, 89, 100,  
103, 120, 152, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 163,  
185, 198, 199, 201, 202,  
207
- B**
- Barang, 4, 5, 140
- Brandan, vii, 37, 38, 45,  
46, 47, 116, 117, 127,  
129, 130, 133, 136, 163,  
164, 179, 183, 184, 185,  
186, 198, 200, 206, 207
- C**
- Covid-19, 7, 14, 17, 142,  
200
- D**
- Daerah, 26, 27, 40, 42, 43,  
44, 100, 101, 104, 105,  
116, 152, 163, 199, 200,  
201, 207, 210, 211, 212,  
213
- DAK, 40, 42, 115, 116,  
122, 186, 187, 188, 189,  
190, 192, 193, 194, 195,  
198, 207
- Dana Alokasi Khusus, 40,  
42, 113, 115, 120, 192,  
194, 207
- Dana Desa, vi, vii, 15, 16,  
18, 19, 21, 22, 26, 39, 40,  
42, 43, 44, 46, 47, 100,  
101, 102, 103, 104, 105,  
113, 114, 115, 119, 120,  
121, 143, 152, 153, 154,  
155, 156, 157, 158, 159,  
161, 162, 163, 178, 184,  
185, 186, 191, 198, 199,  
200, 201, 202, 203, 206,  
207, 212, 213
- DD, 43, 100, 116, 121, 186,  
187, 188, 189, 191, 193,  
194, 195, 198, 199, 200,  
201, 202, 207, 208
- Desa, vi, vii, 10, 11, 15, 16,  
19, 21, 26, 27, 28, 29, 30,  
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,  
42, 43, 44, 46, 100, 101,  
102, 103, 104, 105, 106,

107, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 116, 117, 118,  
119, 122, 126, 132, 133,  
152, 153, 154, 155, 156,  
157, 159, 160, 161, 163,  
164, 165, 166, 168, 170,  
171, 172, 173, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 180,  
182, 183, 184, 185, 186,  
187, 188, 191, 193, 195,  
198, 199, 200, 201, 202,  
203, 206, 207, 210, 211,  
212, 213

## E

Ekonomi, v, vi, vii, 4, 5, 6,  
7, 17, 32, 50, 54, 57, 58,  
59, 61, 72, 74, 76, 105,  
110, 119, 134, 138, 140,  
164, 168, 169, 179, 210,  
211, 212, 213, 214, 216

## I

IDM, vi, 27, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 46, 109, 110,  
112, 114, 116, 179, 180,  
181, 182, 183, 185, 186,  
187, 188, 189, 190, 193,  
194, 195, 198, 206, 211,  
212, 213

Indeks, vi, vii, 22, 23, 24,  
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,  
34, 35, 37, 38, 45, 46,

106, 107, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115, 119,  
120, 122, 144, 150, 164,  
171, 172, 173, 174, 175,  
176, 178, 179, 180, 182,  
183, 184, 185, 186, 187,  
188, 192, 193, 195, 206,  
207, 210, 211, 213

Indonesia, 2, 4, 5, 6, 8, 13,  
14, 16, 21, 23, 29, 30, 33,  
34, 39, 40, 43, 83, 87, 88,  
89, 100, 106, 107, 109,  
114, 161, 163, 164, 165,  
166, 167, 177, 180, 192,  
210, 211, 212, 213, 214

IPD, vi, vii, 27, 29, 30, 31,  
32, 33, 35, 46, 106, 109,  
112, 113, 114, 116, 119,  
122, 164, 165, 166, 167,  
168, 172, 173, 175, 176,  
177, 178, 180, 182, 186,  
206, 207, 211

IPM, 12, 22, 23, 24, 25,  
113, 115, 116, 122, 144,  
145, 186, 187, 188, 189,  
190, 192, 193, 194, 195,  
207, 213

## J

Jasa, 4, 5, 135, 140

**K**  
Kemiskinan, 12, 71, 149,  
150, 168, 212, 213  
Keuangan, 15, 18, 20, 42,  
83, 89, 103, 114, 115,  
116, 135, 157, 159, 160,  
161, 199, 210, 211, 212,  
213, 214  
Konsumsi, 5, 7, 11, 78, 139

**L**  
Langkat, vii, 20, 21, 24,  
25, 32, 35, 36, 37, 38, 44,  
45, 46, 47, 112, 116, 117,  
119, 126, 127, 128, 129,  
130, 131, 132, 133, 134,  
135, 136, 137, 138, 139,  
140, 143, 144, 145, 146,  
147, 148, 149, 150, 160,  
161, 162, 163, 164, 173,  
175, 176, 177, 178, 179,  
180, 181, 182, 183, 184,  
185, 186, 189, 190, 191,  
192, 194, 195, 198, 199,  
203, 206, 207, 210

**M**  
Manusia, 22, 23, 24, 113,  
115, 120, 122, 144, 192,  
195, 207, 210, 213, 216  
Masyarakat, 15, 39, 41, 78,  
115, 163, 168, 185, 201,  
202, 213

Membangun, vi, vii, 15,  
27, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  
39, 46, 109, 110, 111,  
112, 114, 119, 163, 179,  
180, 182, 183, 184, 185,  
186, 187, 188, 193, 195,  
206, 211, 213  
Modal, 51, 110, 139

**N**  
Nasional, 7, 8, 81, 156,  
157, 210, 211  
Negara, 26, 88, 89, 100,  
101, 102, 152, 163, 165,  
198, 199, 207, 211

**P**  
Pembangunan, v, vi, vii,  
2, 3, 10, 12, 22, 23, 24,  
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,  
46, 48, 49, 50, 52, 54, 57,  
58, 59, 61, 91, 100, 104,  
105, 106, 107, 109, 112,  
113, 114, 115, 116, 119,  
120, 122, 144, 155, 156,  
162, 164, 171, 172, 173,  
174, 175, 176, 178, 180,  
186, 192, 195, 199, 200,  
201, 202, 206, 207, 208,  
210, 211, 212, 213, 214  
Pemerintah, vi, 5, 7, 25,  
26, 39, 43, 44, 90, 91, 93,  
100, 105, 119, 135, 139,

152, 171, 198, 201, 202,  
212  
Pengeluaran, vi, 5, 82, 87,  
90, 91, 93, 94, 96, 138,  
139, 149, 212  
Pertumbuhan, v, 4, 5, 6, 7,  
8, 17, 18, 23, 66, 67, 68,  
72, 74, 76, 83, 120, 137,  
138, 139, 140, 178, 210,  
211, 213

### S

Sosial, vi, vii, 4, 5, 32, 110,  
135, 144, 164, 179

Sumatera Utara, 16, 17,  
18, 19, 21, 24, 25, 29, 30,  
31, 32, 35, 36, 44, 126,  
128, 141, 142, 143, 158,  
159, 160, 161, 162, 171,  
172, 173, 174, 175, 198,  
210, 211, 213, 214, 216

### W

Wilayah, 3, 19, 126, 127,  
128, 160, 210, 213



# Implementasi Kebijakan & Pengelolaan Dana Desa *Terhadap* Capaian Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Buku Monografi Implementasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa mengambil studi kajian di wilayah pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Pada intinya buku ini mengulas lima bagian utama, di antaranya; menganalisis perkembangan Dana Desa, menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebelum kebijakan Dana Desa dan selama ada Dana Desa, menganalisis capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) pada masa pemerintahan Jokowi, mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan menganalisis implementasi tata kelola penggunaan Dana Desa baik dari aspek ekonomi dan kualitas hidup pada wilayah pesisir kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan, Sumatera Utara  
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>  
Email: [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

## REFERENSI

ISBN 978-623-408-331-6



ISBN 978-623-408-332-3 (PDF)



Harga P. Jawa Rp. 85.000,00